



Swantara

Majalah Triwulan Lemhannas RI No. 55 Desember 2025

Seputar Kita

Gubernur Lemhannas RI:
Pentingnya Penegak
Hukum Memegang Prinsip
Kebangsaan

Profil Pejabat

Laksamana Pertama TNI Gunawan Tri
Atmojo, S.T., M.A.P., M.Tr.Opsla.,
CRMP.: "...Kalau kerja kita jalankan
dengan niat ibadah, hasilnya pasti
berkah..."

Opini

Penguatan Strategi dan Kolaborasi
Mewujudkan Indonesia Bersinar
Melalui Pendekatan War On Drugs
for Humanity dalam Rangka
Meningkatkan Ketahanan Nasional



Versi Digital

KPPD ANGKATAN II:

MENYEMAI KEPEMIMPINAN STRATEGIS DAERAH MENUJU INDONESIA EMAS 2045



LAPORAN ASPIRASI DAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK LEMHANNAS RI



TAHUN 2025

Laporan aspirasi dan pengaduan pelayanan publik yang telah dikelola oleh Lemhannas RI pada periode Januari - Desember 2025

Rekapitulasi			Kategori	
Laporan Tertunda 1	 1	 7	 Pembinaan Kepegawaian 3	
Laporan Arsip 1				
 Total Laporan Masuk 8	100% Laporan Ditindaklanjuti	 11,9 Hari Rata-rata Tindak Lanjut	 Gaji dan Tunkin 2	
Unit Kerja	Jenis Kelamin		 Pelanggaran Mudik ASN 1	
Lembaga Ketahanan Nasional 2		Perempuan  1		 Lainnya terkait Kepolisian 1
Biro Umum Settama 4		Laki-laki  7	 Lainnya terkait ketentraman, ketertiban umum, dan Perlindungan masyarakat 1	
Biro Humas Settama 2				

Keterangan:

1. Laporan Arsip dan Tertunda tidak dihitung dalam total laporan yang masuk
2. Laporan yang diarsipkan karena laporan berulang.
3. Laporan tertunda karena memiliki data yang belum lengkap, sehingga menunggu pelapor untuk menyertakan data dukung lainnya.



PELINDUNG ACE HASAN SYADZILY

PEMBINA EDWIN

PENGARAH R. Z. PANCA PUTRA S.

PENANGGUNGJAWAB/PEMIMPIN REDAKSI

MUHAMMAD ARIF NUR

REDAKTUR HENDRA SETIAWAN

PENYUNTING/EDITOR BAMBANG IMAN ARYANTO,

CAHYAQADRI HILDAMONA

DESAIN GRAFIS ARINI MAULIDIA

FOTOGRAFER ANGGA MITRA TAMA

SEKRETARIAT MAGISTA DIAN FITRILIA, GATOT, AIDHA

SAHLA ADIWIDYA, DWI ARIYANI, DEANNISA SAVITRI

PENULIS ARTIKEL MAULIDA ARBANINGSIH,

NAOMI AUGUSTINA, SUCITRA PUTERI RACHMAN

**ALAMAT REDAKSI BIRO HUMAS LEMHANNAS RI
JL. MEDAN MERDEKA SELATAN NO. 10 JAKARTA 10110**

Telp. (021) 3832470

Email: redaksihumaspubbit@gmail.com

Instagram: @lemhannas_ri

Facebook: @lembagaketahanannasionalri

Twitter: @LemhannasRI

Youtube: Lemhannas RI

TikTok: @lemhannas_ri

ISI DI LUAR TANGGUNG JAWAB PERCETAKAN

**SWANTARA MENERIMA ARTIKEL DAN OPINI DARI LUAR
LEMHANNAS RI DAN AKAN DIMUAT APABILA SESUAI
DENGAN KEBIJAKAN REDAKSI**

Salam Redaksi

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam Sejahtera Bagi Kita Semua, Shalom

Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan

Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat dan karunia-Nya, Majalah Swantara Edisi 55, Desember 2025, telah terbit di tengah-tengah kita. Tim Redaksi Majalah Swantara terus berupaya maksimal dalam menyajikan berbagai informasi pilihan melalui beragam rubrik. Diharapkan sajian informasi dalam Majalah Swantara dapat memberikan sudut pandang baru yang membuka wawasan dan pengetahuan pembaca.

Untuk rubrik Laporan Utama pada edisi kali ini, dibahas mengenai penyelenggaraan Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Angkatan II Tahun 2025, salah satu program unggulan Lemhannas RI dalam memperkuat kualitas kepemimpinan daerah sebagai bagian integral dari ketahanan nasional. KPPD Angkatan II ditujukan sebagai wadah untuk mengasah kemampuan konseptual, memperkuat nilai moral, serta menanamkan keterampilan praktis dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Pada rubrik Seputar Kita, redaksi menyajikan informasi terkait ide, gagasan, dan kegiatan yang dilaksanakan Lemhannas RI. Sementara itu, rubrik Profil mengangkat sosok pejabat Lemhannas RI yang baru dilantik serta pegawai teladan, sehingga pembaca dapat mengenal lebih dekat dan menjadikannya inspirasi. Selain itu, tim redaksi juga menghadirkan rubrik lain seperti Opini, Hot News, dan Ragam, yang dapat menjadi referensi tambahan dalam memperkaya pengetahuan pembaca setia Majalah Swantara.

Tim redaksi menyadari bahwa Majalah Swantara masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, redaksi sangat mengharapkan saran dan masukan dari para pembaca demi keberlangsungan serta peningkatan kualitas karya jurnalistik pada edisi-edisi berikutnya.

Akhirnya, tim redaksi menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan dalam terbitnya Majalah Swantara Edisi 55, Desember 2025. Semoga Majalah Swantara dapat memberikan banyak manfaat dan berkesan di hati para pembaca.

Terima Kasih.

Om Shanti Shanti Shanti Om

Namo Buddhaya

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Daftar Isi

6 LAPORAN UTAMA KPPD Angkatan II: Menyemai Kepemimpinan Strategis Daerah Menuju Indonesia Emas 2045

SEPUTAR KITA



- 10 Laksanakan Studi Strategis Dalam Negeri, Peserta P3N XXVI Lemhannas RI Kunjungan Pemprov DKI Jakarta
- 12 Sampaikan Materi Artificial Intelligence, Wamendikti RI: Manusia Harus Tetap Memegang Kendali Atas sistem AI
- 14 Mendikdasmen RI: Guru Adalah Agent of Civilization, Bukan Hanya Agen Pembelajaran



- 16 Ketua KPK Paparkan Strategi Penguatan Antikorupsi kepada Peserta P3N XXVI
- 18 Gubernur Lemhannas RI: Pentingnya Penegak Hukum Memegang Prinsip Kebangsaan
- 20 Gubernur Lemhannas RI Sampaikan BRI Indonesia-Tiongkok Dalam Perspektif Ketahanan Nasional



- 21 Lemhannas RI Kolaborasikan Pelatihan Bagi Pimpinan Daerah Bersama Kemendagri dan Purnomo Yusgiantoro Center
- 22 Rancang Program Unggulan Daerah, Peserta KPPD Ikuti Pembelajaran Strategis di Singapura
- 24 Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Angkatan II Resmi Ditutup

SEPUTAR KITA

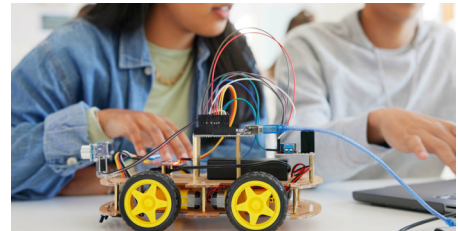


- 26 Alumni P3N Angkatan 26 Harus Menjadi Agen Perubahan dan Penggerak Perjalanan Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045
- 28 ToT Lemhannas RI Berkontribusi Aktif dalam Menjaga Keutuhan Bangsa



- 30 Refleksi Akhir Tahun 2025, Gubernur Lemhannas RI Siap Memperkuat Daya Lenting Bangsa Tahun 2026
- 31 Lemhannas RI Berhasil Mempertahankan Predikat Informatif untuk Keempat Kalinya

OPINI



- 32 Memaknai Bela Negara Bagi Insan Robotika Guna Penguasaan Teknologi Terkini Dalam Rangka Menuju Generasi Indonesia Emas
- 37 Penguatan Strategi dan Kolaborasi Mewujudkan Indonesia Bersinar Melalui Pendekatan War On Drugs For Humanity Dalam Rangka Meningkatkan Ketahanan Nasional

PROFIL PEJABAT

41



Laksamana Pertama TNI Gunawan Tri Atmojo, S.T., M.A.P., M.Tr.Opsla., CRMP.:
“...kalau kerja kita jalankan dengan niat ibadah, hasilnya pasti berkah...”

44



Tri Bintang Dewantoro :
“Inovasi untuk Transformasi Digital Lemhannas RI”

HOT NEWS



- 46 Langkah Berani Indonesia di COP30: Komitmen, Aksi, dan Diplomasi Iklim Dunia
- 47 Indonesia Bersinar, Runner-Up SEA Games 2025

RAGAM



- 48 Rafflesia hasseltii: Simbol Keunikan dan Kerentanan Alam Indonesia
- 49 Danau Towuti: Permata Purba yang Menyimpan Rahasia Iklim Dunia

SUARA PESERTA



- 50 Penerima Penghargaan Akademik Terbaik P3N 26 Lemhannas RI: Inspektur Jenderal Polisi Dr. Barito Mulyo Ratmono, S.I.K., M.Si.
- 51 Penerima Penghargaan KKP Terbaik P3N 26 Lemhannas RI: Brigadir Jenderal Polisi Muhammad Firman, S.I.K., M.Si.



52 GALLERY

KPPD ANGKATAN II:

MENYEMAI KEPEMIMPINAN STRATEGIS DAERAH MENUJU INDONESIA EMAS 2045



Sejarah menunjukkan bahwa keberhasilan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas kepemimpinan yang dimilikinya. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan keragaman budaya, sumber daya alam yang melimpah, serta tantangan geopolitik yang dinamis membutuhkan pemimpin daerah yang tidak hanya piawai mengelola pemerintahan, tetapi juga memiliki wawasan strategis kebangsaan. Era disrupsi teknologi, ketidakpastian geopolitik, serta kompleksitas pembangunan daerah saat ini juga menuntut pemimpin yang tidak hanya visioner tetapi juga tangguh dan berintegritas. Oleh karena itu, Lemhannas RI kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat kapasitas kepemimpinan daerah melalui penyelenggaraan Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Angkatan II Tahun 2025.

KPPD tidak hanya hadir sebagai program unggulan dalam memperkuat kualitas kepemimpinan daerah sebagai bagian integral dari ketahanan nasional namun juga sebagai wadah untuk mengasah kemampuan konseptual, memperkuat nilai moral, serta menanamkan keterampilan praktis dalam tata kelola pemerintahan daerah. Sebagai sebuah “refresh program” kepemimpinan nasional di tingkat daerah, KPPD bertujuan membangun kembali semangat dan komitmen kenegaraan para kepala daerah/peserta dalam mewujudkan visi misi pemerintah. Para peserta didorong untuk tidak hanya menjadi administrator pemerintahan, tetapi juga negarawan yang memiliki kepekaan geopolitik, kepedulian sosial, dan keberanian moral untuk mengutamakan kepentingan rakyat di atas segalanya. Dengan mengikuti program ini, setiap kepala daerah diharapkan mampu menjawab tantangan strategis, baik pengaruh geopolitik, bonus demografi, dan perubahan iklim, hingga hilirisasi industri dan transformasi digital, melalui strategi yang terukur, adaptif, dan berpihak pada rakyat.

Kegiatan ini berlangsung selama 15 hari, dari tanggal 4 hingga 18 November 2025, dan merupakan hasil sinergi antara Lemhannas RI, Kementerian Dalam Negeri melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), serta Purnomo Yusgiantoro Center (PYC). KPPD Angkatan II dilaksanakan di dua lokasi utama, yakni Jakarta dan Singapura, dengan melibatkan institusi internasional terkemuka seperti National University of Singapore (NUS) dan Lee Kuan Yew School of Public Policy (LKYSPP). Program ini dirancang sebagai wadah strategis untuk membentuk kepala daerah yang tidak hanya kompeten secara administratif, tetapi juga memiliki karakter kenegarawanan, wawasan kebangsaan



yang kuat, serta kemampuan adaptif dalam menghadapi dinamika global.

Kegiatan diawali dengan Gala Dinner pada malam tanggal 4 November 2025 yang diselenggarakan di Ruang Pancasila, Gedung Trigatra, Lemhannas RI. Dalam sambutannya, Gubernur Lemhannas RI, Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si., menyampaikan bahwa acara tersebut merupakan bagian penting dari proses pembelajaran. “Acara ini bukan sekadar jamuan makan malam, tetapi merupakan momen *ice breaking* untuk membangun keakraban di antara para peserta yang berasal dari latar belakang yang sangat beragam. Kami ingin para pemimpin daerah ini saling mengenal, menyatu, dan bersinergi,” ujar Gubernur Lemhannas RI. Beliau juga menyampaikan apresiasi kepada PYC dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan ini.

Gubernur Lemhannas RI menegaskan pentingnya pemahaman geopolitik global bagi para peserta KPPD. Dalam sesi pembekalan yang berlangsung di Lemhannas RI (5/11), Ace menekankan bahwa dinamika global saat ini memiliki dampak langsung terhadap ketahanan nasional dan arah pembangunan daerah. “Ketahanan nasional yang rapuh tidak akan mampu mewujudkan tujuan nasional,” tegasnya dalam paparannya.

Ia menjelaskan bahwa rivalitas negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia telah memicu ketegangan geopolitik yang berdampak pada rantai pasok global, stabilitas ekonomi, dan arah investasi. Konflik di berbagai kawasan seperti Rusia-Ukraina, Timur Tengah, dan Indo-Pasifik turut memengaruhi posisi strategis Indonesia di kawasan ASEAN. Selain itu, Ace juga menyoroti pengaruh Belt and Road Initiative (BRI) Tiongkok terhadap

berbagai dimensi ketahanan nasional Indonesia, termasuk energi, demografi, ideologi, dan pertahanan keamanan.

Menurutnya, kepala daerah perlu memahami bagaimana kebijakan global dapat memengaruhi pembangunan lokal. “Bangsa yang tangguh bukanlah yang tak pernah goyah, melainkan yang mampu beradaptasi dan bertransformasi dalam menghadapi setiap goncangan,” tambahnya.

Materi pembekalan juga mencakup tantangan domestik seperti bonus demografi, perubahan iklim, disrupsi teknologi, serta menurunnya kohesi sosial akibat konsumsi digital yang tidak terfilter. Dalam konteks ini, Ace mengingatkan bahwa kepala daerah dituntut menjadi pemimpin yang visioner, transformatif, dan adaptif. Sebagai bagian dari program KPPD, para peserta juga dibekali pemahaman tentang Asta Cita dan RPJMN 2025–2029, serta diarahkan untuk menyusun program unggulan daerah yang selaras dengan visi Indonesia Emas 2045.

Tingkatkan Kapasitas hingga Wujudkan Kontribusi Nyata

KPPD Angkatan II yang hadir sebagai “kawah candradimuka” bertujuan membentuk pemimpin daerah yang berkarakter negarawan, berintegritas, dan profesional, serta memiliki pola pikir yang komprehensif, integral, dan holistik. Selain itu, program ini diarahkan untuk memperkuat wawasan dan karakter kebangsaan melalui internalisasi nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pengembangan kapasitas perencanaan strategis juga menjadi fokus penting agar para peserta mampu menerjemahkan Asta Cita Presiden dan RPJMN 2025–2029 ke dalam kebijakan pembangunan daerah

● LAPORAN UTAMA



yang terukur dan implementatif. KPPD Angkatan II juga mendorong peningkatan kemampuan inovasi dan kolaborasi melalui studi kasus, studi lapangan, serta pengayaan praktik program unggulan di Singapura sebagai upaya memperluas wawasan global para kepala daerah. Seluruh rangkaian pembelajaran ini dirancang untuk bermuara pada lahirnya proyek unggulan daerah yang aplikatif dan dapat menjadi kontribusi nyata bagi pembangunan di wilayah masing-masing.

Program ini menyasar 25 kepala daerah yang dipilih oleh Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri RI), dengan komposisi representasi dari wilayah Indonesia Barat dan Tengah. KPPD angkatan II diharapkan dapat melahirkan pemimpin daerah yang berkarakter negarawan, berintegritas, dan profesional, serta terbangunnya jejaring kepemimpinan strategis antardaerah sebagai modal sosial dalam memperkuat pembangunan nasional.

Selain itu, peserta diharapkan mampu menyusun proposal proyek unggulan daerah yang relevan dengan prioritas nasional dan memiliki nilai implementasi tinggi. Nilai-nilai ketahanan nasional juga diharapkan dapat terinternalisasi dalam pola pikir dan tindakan kepemimpinan peserta, sehingga mereka mampu menghadapi dinamika dan tantangan pembangunan di masa depan. Dengan tujuan yang menyeluruh dan pendekatan berbasis pembelajaran strategis, KPPD Angkatan II diposisikan sebagai program unggulan yang memadukan penguatan jati diri kebangsaan dengan pengayaan wawasan global guna membentuk kepemimpinan daerah yang tangguh, adaptif, dan visioner menuju Indonesia Emas 2045.

Tiga Pilar Pembelajaran

Struktur program KPPD Angkatan II disusun secara sistematis dan bertahap melalui tiga fase pembelajaran yang saling menopang. Fase pertama berlangsung di Lemhannas RI, Jakarta, pada 4–8 November 2025 dengan penekanan pada penguatan karakter kebangsaan. Pada fase ini, peserta mendapatkan pendalaman wawasan kebangsaan, pemahaman mengenai geopolitik dan geostrategi, serta penghayatan nilai-nilai dasar negara yang mencakup Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Seluruh rangkaian kegiatan diberikan melalui ceramah para tokoh nasional, diskusi interaktif, studi kasus, dan simulasi strategis yang dirancang untuk menumbuhkan pola pikir yang komprehensif dan integral dalam menghadapi tantangan kepemimpinan daerah.

Fase kedua diselenggarakan di Singapura pada 9–15 November 2025 sebagai

bagian dari pengayaan program unggulan berkelas internasional. Melalui kerja sama dengan National University of Singapore (NUS) dan Lee Kuan Yew School of Public Policy (LKYSPP), peserta diperkenalkan pada praktik-praktik terbaik dunia dalam tata kelola pemerintahan, kepemimpinan, keberlanjutan lingkungan, transformasi digital, pelayanan publik, sistem kesehatan, pendidikan, dan pengembangan kota cerdas. Proses pembelajaran dilakukan melalui kuliah umum, kunjungan lapangan, serta dialog strategis bersama para praktisi dan pejabat pemerintah Singapura. Fase ini bertujuan memperluas perspektif peserta terhadap perkembangan global dan mendorong lahirnya inovasi dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Fase ketiga merupakan tahap lanjutan berupa penyusunan proyek unggulan daerah yang dilaksanakan di BPSDM Kemendagri, Jakarta, pada 16–18 November 2025. Dalam fase ini, peserta didampingi untuk



merancang proposal proyek unggulan daerah yang berlandaskan hasil pembelajaran dari fase sebelumnya. Proyek tersebut diharapkan menjadi kontribusi nyata peserta dalam menghadapi tantangan pembangunan di daerah masing-masing. Kegiatan dilaksanakan melalui sesi coaching, mentoring, presentasi, dan finalisasi rancangan konsep proyek yang akan menjadi bagian dari evaluasi akhir program.

KPPD Angkatan II menerapkan pendekatan andragogi, yaitu metode pembelajaran orang dewasa yang menekankan partisipasi aktif, refleksi kritis, dan penerapan langsung. Metode pembelajaran meliputi ceramah dan diskusi, studi kasus, studi lapangan, dialog interaktif, serta penyusunan proyek akhir sebagai bentuk penerapan hasil pembelajaran ke dalam program unggulan daerah.

Keterpaduan program dirancang secara integratif dan berjenjang. Di Jakarta, peserta mendapatkan pemantapan karakter kepemimpinan yang berwawasan kebangsaan dan memahami berbagai dimensi ketahanan nasional. Di Singapura, peserta memperoleh pengayaan perspektif global untuk merancang program unggulan daerah yang inovatif dan berkelanjutan. Pada tahap akhir, peserta menyusun proyek unggulan sesuai karakteristik daerah masing-masing sebagai bagian dari rancangan pembangunan daerah yang aplikatif dan berdampak langsung pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Transformasi Karakter Pimpinan Daerah menuju Indonesia Emas 2045

Melalui KPPD Angkatan II tahun 2025 diikuti oleh 12 Walikota dan 17 Bupati dari berbagai wilayah Indonesia Barat dan Tengah ini, Lemhannas RI menegaskan perannya sebagai kawah candradimuka bagi para pemimpin bangsa. Program ini merupakan sebuah program strategis yang dirancang untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan daerah dalam menjawab tantangan bangsa dalam mewujudkan cita-cita bangsa "Indonesia Emas 2045".

Selama kegiatan KPPD angkatan II para peserta juga diarahkan untuk mampu membentuk karakter kepala daerah yang negarawan, berintegritas, dengan dengan memegang teguh etika, serta memiliki cara pandang yang komprehensif, integral, holistik, profesional, mampu membangun kerja sama serta mampu mengimplementasikan visi Asta Cita melalui proyek unggulan daerah.

"Sebagai Gubernur Lemhannas RI, saya menekankan bahwa proyek unggulan yang telah saudara-saudara rancang bukanlah sekadar dokumen biasa, melainkan sebuah komitmen dari seorang pemimpin daerah yang telah mengikuti kursus pemantapan pimpinan daerah untuk memberikan segala ide, tenaga, dan pemikirannya bagi kesejahteraan masyarakat di wilayahnya," Jelas Gubernur Lemhannas RI dalam sambutan penutupan KPPD Angkatan II Tahun 2025 di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kemendagri RI.

Oleh karena itu, Lemhannas RI dan Kemendagri RI, yang difasilitasi oleh Purnomo Yusgiantoro Center (PYC) ke depan perlu melakukan monitoring dan

di Lemhannas RI, peserta telah ditempa dengan nilai-nilai kebangsaan dan strategi ketahanan nasional. Di Singapura, peserta memperoleh wawasan internasional dan praktik terbaik tata kelola pemerintahan. Sementara di BPSPD Kemendagri, peserta telah diminta mengkristalisasi gagasan dalam bentuk proyek unggulan daerah yang konkret. Dengan demikian, rangkaian ini membentuk siklus belajar lengkap: dari konseptual, praktikal, hingga aplikatif.

KPPD adalah cerminan dari cita-cita kolektif bangsa: melahirkan pemimpin daerah yang berkarakter negarawan, berorientasi pada pelayanan publik, serta mampu menjaga keseimbangan antara modernitas dan nilai tradisi. Dengan semangat kolaborasi dan



evaluasi secara berkala guna memastikan bahwa proyek unggulan daerah yang disusun benar-benar dijalankan, disempurnakan, dan memberikan dampak nyata kepada masyarakat.

Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) angkatan II merupakan momentum strategis untuk membangun kepemimpinan daerah yang tangguh, berintegritas, dan visioner. Di tengah dunia yang penuh ketidakpastian, pemimpin daerah dituntut tidak hanya untuk mengelola administrasi pemerintahan, tetapi juga untuk menjadi penggerak perubahan yang mampu menjaga harmoni sosial, memperkuat daya saing ekonomi, serta menegakkan nilai-nilai kebangsaan.

Program ini adalah jawaban atas kebutuhan bangsa untuk memiliki pemimpin daerah yang mampu menghubungkan visi besar Indonesia Emas 2045 dengan realitas di tingkat lokal. Melalui proses pembelajaran

inovasi, para peserta diharapkan menjadi pemimpin yang juga mampu menjawab tantangan lokal, nasional, dan global secara adaptif dan berpihak pada kepentingan rakyat.

"Kami berharap saudara-saudara dapat mengimplementasikan hasil kursus ini di daerah masing-masing, dan mampu menjawab tantangan perubahan zaman, serta memiliki komitmen yang kuat untuk dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta mampu mewujudkan tujuan nasional (national interest) di wilayah masing-masing dan menjadi contoh dan teladan bagi bawahan dan masyarakatnya, dengan tidak terlibat dalam masalah hukum. Hal ini senada dengan pesan yang disampaikan oleh bapak Presiden Prabowo Subianto, "bahwa ikan busuk mulai dari kepalanya",” tutup Gubernur Lemhannas RI DR. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si..

Laksanakan Studi Strategis Dalam Negeri,

Peserta P3N XXVI Lemhannas RI Kunjungan Pemprov DKI Jakarta

Gubernur Lemhannas RI Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si. memimpin kegiatan Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) P3N XXVI ke Balai Kota Provinsi DKI Jakarta pada hari kedua SSDN, Rabu (24/9). Kunjungan ini diterima langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

Dalam sambutannya, Gubernur Lemhannas RI menekankan bahwa DKI Jakarta merupakan salah satu daerah dengan SDM paling unggul di Indonesia. Karena itu, studi strategis yang dilakukan ke Pemprov DKI Jakarta dinilai tepat untuk memberikan contoh praktik baik dalam pembangunan SDM. Beliau menyampaikan harapan agar peserta P3N XXVI dapat memanfaatkan studi ini untuk memperluas perspektif mengenai pemerataan pembangunan berbasis SDM unggul di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Setelah itu, fokus diskusi bergeser pada paparan Gubernur DKI Jakarta. Pramono Anung menyampaikan bahwa upaya meningkatkan kualitas SDM di Jakarta dilakukan melalui transformasi sosial. Masyarakat perlu diajak terlibat aktif memperbaiki kualitas hidupnya. Beliau menekankan bahwa salah satu tantangan terbesar Jakarta adalah kesenjangan antara warga yang mampu dan yang kurang beruntung. Meskipun telah terjadi perbaikan, pemerataan hasil pembangunan masih harus terus ditingkatkan.

Pramono Anung kemudian mengaitkan pembangunan SDM dengan kualitas aparatur sipil negara (ASN). Profesionalisme dan integritas ASN disebut sebagai fondasi perubahan. Beliau memberikan contoh konkret, seperti kewajiban ASN menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu dan kedisiplinan hadir tepat waktu dalam setiap rapat.

Lebih lanjut, beliau menjelaskan sejumlah inovasi yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Salah satunya adalah penerapan tarif Rp1,00 untuk transportasi umum pada hari-hari tertentu, seperti HUT DKI Jakarta dan HUT Kemerdekaan RI. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan kedekatan warga dengan fasilitas publik. Dalam bidang pendidikan, Pemprov DKI Jakarta mendorong kerja sama dengan universitas-universitas terbaik dunia melalui program yang dikelola Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) daerah. Pramono Anung menegaskan bahwa program ini dirancang untuk mempersiapkan calon pemimpin masa depan yang berasal dari keluarga sederhana.

Kegiatan SSDN P3N XXVI diakhiri dengan pendampingan oleh jajaran Lemhannas RI, antara lain Wakil Gubernur Lemhannas RI Laksdya TNI Edwin, S.H., M.Han., M.H., Sekretaris Utama Lemhannas RI Komjen Pol Drs. R.Z. Panca Putra S., M.Si., para deputi, serta kepala biro.





PENDIDIKAN PIMPINAN TINGKAT NASIONAL

Sampaikan Materi Artificial Intelligence, Wamendikti RI: **Manusia Harus Tetap Memegang Kendali Atas sistem AI**

Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Prof. Stella Christie, Ph.D. memberikan kuliah umum bagi Peserta Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) XXVI Lemhannas RI di Auditorium Gadjah Mada pada Senin (13/10). Dalam kesempatan

tersebut, ia membawakan materi berjudul "Artificial Intelligence (AI), Data, dan Ketahanan Nasional: Pertaruhan Masa Depan Indonesia".

Pada bagian awal paparannya, Stella Christie menyoroti perkembangan AI sebagai tantangan global yang berdampak

langsung pada Indonesia. Ia menilai AI dapat mengancam sejumlah profesi, termasuk lulusan ilmu komputer, sehingga pemahaman terhadap implikasinya menjadi sangat penting.

Untuk menggambarkan risiko AI secara komprehensif, Stella Christie menguraikan

empat bentuk risiko utama, yaitu peningkatan pengangguran, penurunan keamanan internet, penurunan reliabilitas informasi, dan meningkatnya kesenjangan sosial. Ia menekankan perlunya masyarakat menganalisis risiko ini secara menyeluruh. Namun, ia juga menegaskan bahwa AI menghadirkan peluang, seperti membuka bisnis baru, meningkatkan akurasi deteksi ancaman, menyediakan alat pemeriksa fakta, serta menjadi penyeimbang bagi negara berkembang dalam penggunaan teknologi.

Stella Christie menjelaskan bahwa AI berpotensi menciptakan lebih banyak pekerjaan dibanding yang digantikan. Karena itu, pemerintah perlu menyiapkan pelatihan untuk membangun keterampilan yang sulit digantikan mesin, antara lain *curiosity and lifelong learning*, *creative thinking*, *technological literacy*, *resilience*, *leadership*, *analytical thinking*, dan *system thinking*. Ia menegaskan kemampuan berpikir analitis dan sistemik sebagai keterampilan paling mendasar di era AI.

Pada dimensi keamanan, Stella Christie menguraikan dua posisi negara dalam

pemanfaatan AI: *good place*, yang menempatkan AI sebagai bagian dari sistem keamanan, dan *bad place*, yang memanfaatkan AI untuk peretasan. Ia menekankan bahwa manusia tetap harus berada di pusat pengambilan keputusan, terutama dalam merespons serangan siber, menentukan langkah pertahanan, dan mengevaluasi keluaran AI. Posisi ini penting karena Indonesia berinteraksi dengan banyak negara lain dan tidak selalu memiliki teknologi AI tercanggih.

Terkait reliabilitas informasi, Stella Christie menilai alat pemeriksa fakta berbasis AI harus tersedia dalam berbagai bahasa dan tidak berpihak pada narasi dominan di internet. Hal ini diperlukan agar masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat dan adil. Ia juga menunjukkan potensi AI sebagai penyeimbang di sektor kesehatan melalui alat prediksi penyakit, serta di dunia pendidikan melalui akses ke kelas daring berkualitas global.

Meski AI berkembang pesat, Stella Christie mengingatkan bahwa teknologi ini tidak boleh menjadi sekadar hype. Ia menyarankan pekerja yang berisiko

tergantikan untuk meningkatkan keterampilan berbasis AI. Sementara itu, generasi muda yang memasuki pasar kerja diminta fokus pada keterampilan yang berpusat pada manusia.

Stella Christie menekankan perlunya kolaborasi dengan pengembang AI untuk memitigasi berbagai risiko, seperti hilangnya pekerjaan, menurunnya peran manusia, melemahnya keamanan, meningkatnya hoaks, serta bertambahnya ketimpangan akibat terkonsentrasinya teknologi pada sedikit perusahaan.

Di bagian akhir paparannya, Stella Christie menegaskan bahwa pemanfaatan AI untuk memperkuat ketahanan nasional harus didasari prinsip transparansi, keadilan, keamanan, privasi, akuntabilitas, serta ketangguhan. Ia menutup kuliah umum dengan menekankan pentingnya pengawasan manusia terhadap seluruh pengambilan keputusan AI demi menjaga kepentingan nasional.



Mendikdasmen RI: **Guru Adalah *Agent of Civilization*, Bukan Hanya Agen Pembelajaran**





Lemhannas RI menghadirkan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI Prof. Dr. Abdul Mu'ti, M.Ed. sebagai narasumber kuliah umum bagi Peserta P3N Angkatan XXVI di Auditorium Gadjah Mada, Lemhannas RI, pada Senin (29/9). Kehadiran Abdul Mu'ti disambut langsung oleh Gubernur Lemhannas RI Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si. Kuliah umum ini diselenggarakan untuk memperkuat pemahaman peserta mengenai arah pembangunan pendidikan nasional.

Dalam sambutannya, Gubernur Lemhannas RI menekankan peran strategis Abdul Mu'ti dalam pelaksanaan program Presiden Prabowo Subianto terkait pembangunan SDM unggul. Ia berharap paparan Abdul Mu'ti dapat menjadi rujukan penting bagi peserta dalam penyusunan kertas kerja perorangan.

Mengawali materi, Abdul Mu'ti menyampaikan optimisme terhadap masa depan Indonesia. Optimisme tersebut didasarkan pada empat modal besar yang dimiliki bangsa, yaitu kekayaan alam yang melimpah, bonus demografi, modal sosial politik, serta modal spiritual masyarakat Indonesia yang dikenal taat. Ia menilai kombinasi keempat modal ini memberikan fondasi kuat bagi Indonesia menjadi bangsa besar.

Setelah menguraikan modal pembangunan, Abdul Mu'ti beralih pada tantangan utama sektor pendidikan. Ia menyebut tiga persoalan yang harus segera ditangani, yaitu pemerataan akses pendidikan, kesenjangan mutu pendidikan, dan persoalan karakter bangsa. Kesenjangan mutu pendidikan ditinjau dari tiga indikator: perbedaan antarwilayah, capaian literasi dan numerasi, serta kesenjangan kualitas antara sekolah negeri dan swasta. Pada dimensi karakter, ia menyoroti fenomena

generasi stroberi, kecanduan gawai, judi daring, pornografi, narkoba, hingga persoalan kesehatan mental dan fisik anak.

Menjawab tantangan tersebut, pemerintah menetapkan dua program prioritas: revitalisasi satuan pendidikan dan program digitalisasi. Program digitalisasi diarahkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran melalui penyediaan Interactive Flat Panel (IFP), laptop, materi pembelajaran digital, serta pelatihan guru.

Pada bagian ini, Abdul Mu'ti menegaskan bahwa teknologi hanya berfungsi sebagai alat bantu. Menurutnya, peran guru tetap menjadi penentu utama keberhasilan pendidikan. Ia menyebut guru sebagai *agent of civilization* yang memiliki tanggung jawab membangun peradaban, bukan sekadar menyampaikan materi pembelajaran.

Untuk memperkuat kompetensi guru, pemerintah menyediakan tiga program: sertifikasi, peningkatan kualifikasi, dan pelatihan kompetensi. Pelatihan kompetensi yang diberikan mencakup pembelajaran mendalam (*deep learning*), coding dan artificial intelligence (AI), serta bimbingan konseling. Penguatan bimbingan konseling diharapkan dapat membantu pembentukan karakter siswa secara lebih sistematis.

Pada aspek karakter, Kemendikdasmen RI menerapkan kebijakan tujuh kebiasaan, yaitu bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur lebih awal. Selain itu, program "Pagi Ceria" diterapkan melalui kegiatan menyanyikan Lagu Indonesia Raya dua kali seminggu sebelum belajar, senam Anak Indonesia Hebat, dan doa bersama. Program-program tersebut diarahkan untuk membangun SDM unggul dan tangguh dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.

Ketua KPK RI Paparkan **Strategi Penguatan Antikorupsi kepada Peserta P3N XXVI**





Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Setyo Budianto memberikan kuliah umum bagi peserta P3N XXVI Lemhannas RI di Auditorium Gajah Mada pada Selasa (14/10). Kuliah umum tersebut mengangkat tema “Penguatan Integritas dan Antikorupsi”, yang menjadi bagian dari upaya pembelajaran peserta mengenai tantangan strategis dalam tata kelola pemerintahan.

Mengawali materinya, Setyo Budianto menjelaskan bahwa akar korupsi bermula dari perilaku manusia ketika menemukan kesempatan dalam lingkungannya. Kesempatan tersebut bisa berasal dari jabatan, instruksi atasan, hingga dorongan kebutuhan pribadi. Penjelasan ini menjadi dasar bagi pemahaman bahwa korupsi tidak hanya disebabkan sistem, tetapi juga faktor karakter dan integritas.

Setyo Budianto kemudian memaparkan kondisi Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang berada pada skor 37 dari 100. Skor tersebut menggambarkan persepsi responden terhadap risiko korupsi dan efektivitas pemberantasan korupsi menurut Transparency International Indonesia. Ia menegaskan bahwa skor tinggi mencerminkan rendahnya risiko korupsi, sementara skor rendah menunjukkan risiko korupsi yang tinggi. Data ini digunakan sebagai landasan untuk melihat posisi Indonesia dalam konteks global.

Untuk meningkatkan skor IPK, Setyo Budianto menyampaikan empat langkah strategis yang membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Pertama, menghapus praktik suap dalam perizinan ekspor-impor, kontrol perdagangan, penghitungan pajak, perlindungan polis, dan pinjaman, termasuk menghilangkan potensi kroni, nepotisme, pendanaan rahasia, serta kedekatan politik dan bisnis. Kedua, memperbaiki nilai political risk dan economic survey yang selama ini memunculkan persepsi tingginya korupsi pada sektor publik, seperti kepolisian, pengadilan, bea cukai, pajak, dan perizinan.

Ketiga, memperkuat penegakan hukum (rule of law) dengan mengurangi penyalahgunaan kewenangan publik di lembaga eksekutif, yudikatif, kepolisian/TNI, dan legislatif. Keempat, meningkatkan kualitas demokrasi melalui tujuh prinsip utama: electoral, liberal, participatory, deliberative, egalitarian, majoritarian, dan consensual. Penjelasan ini menjadi kerangka untuk memahami bahwa perbaikan IPK tidak dapat dilakukan secara parsial.

Setyo Budianto juga memaparkan strategi pemberantasan korupsi yang berfokus pada tiga pendekatan: pendidikan untuk membangun nilai integritas, pencegahan melalui

perbaikan sistem, dan penindakan dengan memberikan efek jera kepada pelaku maupun pihak lain yang terlibat. Ia menekankan bahwa integritas harus menjadi fondasi. “Inovasi dan kreasi penting untuk mengembangkan organisasi agar tetap optimal kinerjanya. Tetapi semua akan sia-sia jika dilakukan tanpa hati nurani dan integritas,” ujarnya.

Selain materi dari Ketua KPK, peserta P3N XXVI menerima pemaparan tambahan dari Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK tentang integritas kepemimpinan. Pada penutupan sesi, Sekretaris Utama Lemhannas RI Komjen Pol Drs. R. Z. Panca Putra S., M.Si. menegaskan bahwa pendidikan di Lemhannas RI tidak hanya bertujuan membentuk karakter negarawan, tetapi juga menanamkan integritas sebagai nilai utama. Ia menyampaikan bahwa integritas berada di ruang hampa: tidak tampak secara fisik, tetapi dapat dirasakan melalui tindakan.

Sestama Lemhannas RI menutup dengan pesan bahwa pemimpin adalah faktor kunci dalam mencegah dan menghapus praktik korupsi. “Bapak Ibu adalah pemimpin. Pemimpin yang kuat dan berintegritas akan membawa perubahan yang lebih baik,” tegasnya saat menutup materi hari itu.



Gubernur Lemhannas RI: **Pentingnya Penegak Hukum Memegang Prinsip Kebangsaan**

Gubernur Lemhannas RI Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si. memberikan kuliah umum bagi peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) Angkatan LXXXII Gelombang II Tahun 2025 di Kampus A Badan Diklat Kejaksaan RI, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pada Kamis (15/10). Sebanyak 355 peserta mengikuti kegiatan ini, terdiri atas 350 pegawai kejaksaan dan 5 peserta dari Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pada kesempatan tersebut, Gubernur Lemhannas RI menegaskan pentingnya peran jaksa dalam penegakan hukum dan ketahanan nasional.

Dalam sambutan pembukanya, Gubernur Lemhannas RI menyampaikan rasa bangga dapat berbagi pandangan dengan para calon jaksa. Ia menekankan bahwa para peserta PPPJ adalah generasi terpilih yang kelak menentukan wajah penegakan hukum Indonesia. Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI Dr. Leonard Eben Ezer Simanjuntak, S.H., M.H. turut menggarisbawahi bahwa penegakan hukum harus dilakukan dengan mempertimbangkan ketahanan nasional, termasuk bagi peserta dari TNI yang dipersiapkan menangani tugas di ranah militer.

Memasuki materi berjudul “Ketahanan Nasional dan Hukum Nasional

Indonesia, Wujudkan Indonesia Emas 2045”, Gubernur Lemhannas RI menyoroti posisi strategis kejaksaan dalam sistem hukum nasional. Ia menegaskan pentingnya keberadaan jaksa yang profesional, tangguh, dan berpegang pada nilai keadilan sebagai syarat bagi tegaknya negara hukum.

Gubernur Lemhannas RI menekankan bahwa pendidikan calon jaksa harus menjadi gerbang pembentukan penegak keadilan berkarakter negarawan. Integritas menurutnya merupakan fondasi utama yang memastikan keadilan dapat ditegakkan tanpa kepentingan pribadi. Ia mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang berarti hukum bersifat mengikat, setara bagi seluruh



warga negara, menjamin hak dan kebebasan, memberikan kepastian, dan menuntut penegakan hukum yang adil.

Gubernur Lemhannas RI menjelaskan bahwa hukum berfungsi sebagai instrumen untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara: melindungi seluruh bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan berperan dalam menciptakan ketertiban dunia. Dalam konteks ini, jaksa tidak hanya menjalankan fungsi penegakan hukum, tetapi juga memastikan hukum menjadi dasar penyelesaian persoalan publik.

Selain itu, Gubernur Lemhannas RI memaparkan capaian rule of law index Indonesia yang dinilai cukup baik. Namun, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) masih berada pada posisi ke-99 dari 180 negara, sejajar dengan negara-negara berkembang. Kondisi ini menjadi peringatan bahwa korupsi masih menjadi ancaman serius yang harus diatasi secara sistematis.

Pada aspek ekonomi, Gubernur Lemhannas RI menyampaikan bahwa

kepastian hukum berperan besar dalam menarik investasi. Ia menyoroti ICOR Indonesia yang berada pada angka 6,33 persen, jauh di atas angka ideal 3,7 hingga 4,6 persen. Tantangan investasi yang dihadapi Indonesia meliputi birokrasi rumit, ketidakpastian regulasi, infrastruktur belum merata, korupsi, rendahnya penegakan hukum, dan kualitas sumber daya manusia yang belum optimal.

Gubernur Lemhannas RI kemudian mengulas dinamika geopolitik global, mulai dari persaingan kekuatan besar, perang dagang, konflik Rusia–Ukraina, konflik Israel–Palestina dan Israel–Iran, hingga disrupsi teknologi. Ia menekankan bahwa hubungan internasional yang sebelumnya bertumpu pada multilateralisme kini bergeser ke orientasi my country first, sehingga setiap negara lebih mementingkan kepentingannya sendiri.

Menghadapi kondisi global dan nasional tersebut, Gubernur Lemhannas RI menegaskan bahwa ketahanan nasional tidak diukur dari kekuatan militer semata. Ketahanan

nasional adalah kemampuan dinamis untuk menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dari dalam maupun luar negeri. Karena itu, penegak hukum harus memegang teguh nilai kebangsaan dan integritas agar mampu menjaga stabilitas dan keadilan nasional.

Menutup kuliahnya, Gubernur Lemhannas RI berpesan kepada peserta PPPJ Angkatan LXXXII untuk terus menjaga ketahanan nasional dan menjadikan hukum nasional sebagai instrumen strategis, bukan sekadar perangkat normatif. Ia menekankan perlunya integritas yang tidak tergoyahkan, patriotisme yang kuat, dan ketangguhan menghadapi situasi global yang penuh ketidakpastian.

“Selamat menunaikan tugas mulia sebagai abdi negara, pengawal, dan penjaga hukum yang berkeadilan demi terwujudnya ketahanan nasional,” ujar Gubernur Lemhannas RI mengakhiri paparannya.

Gubernur Lemhannas RI Sampaikan BRI Indonesia-Tiongkok Dalam Perspektif Ketahanan Nasional

Gubernur Lemhannas RI Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si. menghadiri Belt and Road China Indonesia Business Dialogue yang diselenggarakan oleh Kosgoro 1957, Perhimpunan Pengusaha Indonesia Tionghoa (Perpit), dan China Economic Cooperation Centre (CECC) di Sahid Sudirman Center, Jakarta, pada Selasa (23/10). Acara ini mempertemukan para investor dari Indonesia dan Tiongkok untuk membahas peluang kerja sama strategis kedua negara.

Dalam kegiatan tersebut, Gubernur Lemhannas RI menjadi salah satu pembicara dan memaparkan materi berjudul “Belt and Road Initiative (BRI) Indonesia–Tiongkok dalam Perspektif Ketahanan Nasional”. Pemaparan dimulai dengan penjelasan mengenai tugas pokok dan fungsi Lemhannas RI, meliputi penyiapan kader dan pementapan pimpinan nasional, pengkajian strategis, pementapan nilai-nilai kebangsaan, serta pengukuran Indeks Ketahanan Nasional. Penjelasan ini menjadi dasar untuk memahami posisi Lemhannas RI dalam menilai kerja sama internasional, termasuk BRI.

Gubernur Lemhannas RI kemudian menjelaskan konsep ketahanan nasional

sebagai kemampuan bangsa dalam menjaga keuletan dan ketangguhan untuk mengembangkan kekuatan nasional secara berkelanjutan. Ia menekankan bahwa dimensi ekonomi menjadi bagian penting ketahanan nasional karena langsung memengaruhi pendapatan negara dan kesejahteraan masyarakat.

Memasuki inti materi, Gubernur Lemhannas RI menyoroti sejarah kerja sama BRI Indonesia–Tiongkok yang telah berlangsung sejak 2013. Ia menyampaikan bahwa BRI merupakan kerja sama strategis yang sejalan dengan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui berbagai proyek infrastruktur, seperti kereta cepat Jakarta–Bandung, kawasan industri khusus di Bitung, Kuala Tanjung dan Kualanamu, pengembangan pelabuhan, serta investasi sektor energi.

Gubernur Lemhannas RI menegaskan bahwa dampak BRI tidak hanya dirasakan di sektor ekonomi. Kerja sama ini turut memengaruhi dimensi sosial, budaya, dan politik, serta memperkuat hubungan bilateral Indonesia–Tiongkok, terutama di kawasan ASEAN. Ia menekankan bahwa BRI juga memberi pengaruh terhadap dimensi ketahanan nasional lainnya,

seperti sumber kekayaan alam, demografi, geografi, ideologi, serta pertahanan dan keamanan.

Dalam bagian penutup, Gubernur Lemhannas RI menyampaikan bahwa kerja sama BRI telah memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Indonesia. Ia berharap kerja sama Indonesia–Tiongkok melalui BRI dapat terus diperkuat untuk mendukung kepentingan nasional dan ketahanan nasional Indonesia di masa mendatang. “Kami tentu merasa penting untuk terus membangun kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Tiongkok dalam rangka mendorong dan mewujudkan kemakmuran baik di Indonesia maupun kawasan,” ujarnya.

Acara tersebut turut dihadiri Ketua Umum Perpit Abdul Alek Soelystio, President of China Economic Cooperation Centre (CECC) Mr. Ke Zhizhong, Ketua Umum PPK Kosgoro 1957 Dave Laksono, serta Duta Besar China untuk Indonesia Mr. Wang Lutong.





KURSUS PEMANTAPAN PIMPINAN DAERAH ANGKATAN II

Lemhannas RI Kolaborasikan Pelatihan Bagi Pimpinan Daerah Bersama Kemendagri dan Purnomo Yusgiantoro Center

Kegiatan Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Angkatan II Lemhannas RI resmi dibuka oleh Menteri Dalam Negeri RI Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D. di Lemhannas RI pada Rabu (5/11). Program ini diikuti oleh 25 bupati dan wali kota dari berbagai daerah di Indonesia dan bertujuan memperkuat kapasitas mereka sebagai penyusun kebijakan yang unggul dan berkarakter negarawan.

KPPD Angkatan II diselenggarakan selama dua minggu, dengan rangkaian kegiatan di Jakarta dan di Lee Kuan Yew School of Public Policy (LKYSPP), Singapura. Program ini dirancang untuk memberikan pemahaman holistik kepada kepala daerah mengenai empat konsensus kebangsaan, wawasan nusantara, kepemimpinan strategis, dan komunikasi publik. Penjelasan ini menjadi dasar untuk memastikan bahwa KPPD tidak hanya berorientasi pada teori, tetapi juga praktik kepemimpinan yang konkret.

Dalam amanat pembukaan, Tito Karnavian menyoroti kompleksitas struktur pemerintahan daerah di Indonesia yang terdiri atas 38 provinsi, 98 kota, dan 416 kabupaten. Ia menjelaskan bahwa sebagai negara kepulauan dengan sebaran penduduk yang variatif, pembangunan

di Indonesia memiliki tantangan tersendiri dibandingkan negara berbasis daratan. Untuk itu, kewenangan mengatur kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah diberikan kepada kepala daerah melalui berbagai peraturan gubernur, bupati, dan wali kota.

Tito menegaskan bahwa luasnya kewenangan kepala daerah membuat kualitas kepemimpinan menjadi faktor yang sangat menentukan. Karena itu, penyelenggaraan KPPD dinilai penting sebagai sarana pemantapan peran kepala daerah dalam menjalankan fungsi strategis mereka. Ia berharap pengalaman pembelajaran dalam program ini dapat menginspirasi peserta untuk menghadirkan inovasi dan perubahan nyata di daerah masing-masing. Pada kesempatan tersebut, Tito juga memberikan apresiasi kepada Gubernur Lemhannas RI serta Purnomo Yusgiantoro atas dukungan terhadap pelaksanaan KPPD Angkatan II. "Kita berdoa agar kegiatan berjalan lancar, seluruh peserta kembali dengan sehat, dan dapat membawa perubahan baik di daerahnya," ujarnya.

Setelah upacara pembukaan, Gubernur Lemhannas RI menjelaskan bahwa peserta akan mendapatkan materi dari para profesor, guru besar, dan tenaga ahli. Selain itu, peserta dijadwalkan

mengunjungi berbagai objek strategis di Singapura, termasuk layanan pendidikan, kesehatan, transportasi umum, pengelolaan sampah, serta program makan bergizi gratis di sekolah. "Ini bukan sekadar teori, tetapi pengalaman langsung melihat praktik pelayanan publik terbaik," kata Gubernur Lemhannas RI kepada wartawan.

Pemilihan Singapura sebagai lokasi studi didasarkan pada kualitas sistem pelayanan publik negara tersebut yang dinilai terbaik di dunia berdasarkan Blavatnik Index of Public Administration 2024 oleh Blavatnik School of Government, Oxford University. Dengan mempelajari praktik terbaik tersebut, peserta diharapkan mampu mengadaptasikannya sesuai kondisi daerah masing-masing.

Setelah kembali ke Jakarta, peserta akan memasuki tahap penyusunan rencana strategis daerah di BPSDM Kemendagri. Tahap ini fokus pada perumusan program prioritas yang aplikatif dan menghasilkan output terukur. Selanjutnya, Lemhannas RI, Kemendagri, dan Purnomo Yusgiantoro Center (PYC) akan melakukan pemantauan terhadap implementasi rencana tersebut. "Kami bersama Kemendagri dan PYC akan memonitor hasil rencana kerja para kepala daerah ini agar dapat ditindaklanjuti dan diimplementasikan secara optimal," ujar Gubernur Lemhannas RI mengakhiri pernyataannya.



Rancang Program Unggulan Daerah, Peserta KPPD Ikuti Pembelajaran Strategis di Singapura

Setelah mengikuti pembekalan intensif mengenai kepemimpinan berintegritas dan wawasan kebangsaan di Jakarta, peserta Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Angkatan II melanjutkan sesi pembelajaran strategis di Lee Kuan Yew School of Public Policy – National University of Singapore (LKYSPP–NUS). Program yang berlangsung pada 9 hingga 15 November 2025 ini dirancang untuk memperkuat kapasitas peserta dalam merancang program unggulan daerah yang selaras dengan visi dan misi Asta Cita pemerintah.

Pembelajaran di LKYSPP–NUS menghadirkan sejumlah tokoh dan pakar Singapura. Mereka adalah Mr. Chan Chun Sing, Prof. Lim Siong Guan, Colin Goh, Prof. Yaacob Ibrahim, Prof. Fong Chun Wah, Dr. Ng Yeuk Fan, Ms. Chan Lai Fung, dan Prof. Lawrence Loh. Para pakar ini memberikan pemahaman mendalam mengenai kepemimpinan efektif, transformasi kebijakan publik, keberlanjutan lingkungan, digitalisasi pemerintahan, sistem kesehatan, pendidikan, perumahan publik, serta kemitraan pemerintah dan swasta. Kehadiran para narasumber ini menjadi nilai strategis bagi

peserta dalam memahami model tata kelola modern yang telah membawa Singapura menjadi salah satu negara dengan pelayanan publik terbaik di dunia.

Melalui sesi-sesi tersebut, peserta diajak melihat bagaimana konsistensi arah kebijakan, desain kelembagaan yang kuat, dan kepemimpinan visioner menjadi fondasi utama kemajuan Singapura dari negara berkembang menjadi pusat ekonomi dan inovasi global. Insight tersebut relevan untuk memperkuat kapasitas kepala daerah dalam merumuskan kebijakan yang terarah, adaptif, dan berkelanjutan.

...lola, Kepemimpinan,
...n Akuntabilitas –
...alaman Singapura

antapan Pimpinan Daerah (KPPD)
November 2025

© Lim Siong Guan



Selain pembelajaran di ruang kelas, peserta juga mengikuti peninjauan lapangan terhadap sistem pengelolaan sampah terpadu yang mampu mengubah limbah menjadi energi ramah lingkungan. Model pengelolaan ini menjadi contoh konkret penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan yang berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat.

Pada sesi lainnya, peserta mempelajari sistem pemerintahan digital dan layanan kesehatan publik yang dikelola secara responsif dan transparan. Pendekatan integratif yang menggabungkan

kebijakan, inovasi teknologi, dan orientasi pelayanan publik ini menjadi inspirasi penting bagi upaya penguatan birokrasi daerah di Indonesia.

Melalui program pembelajaran di Singapura, para peserta diharapkan membawa pulang gagasan dan praktik terbaik dalam kepemimpinan transformasional, inovasi kebijakan publik, dan pengelolaan sumber daya berkelanjutan. Pengetahuan tersebut diharapkan dapat diadaptasi ke dalam rencana pembangunan daerah untuk

mendukung percepatan pembangunan nasional.

Pada closing dialogue yang dipimpin oleh Mr. Chan Chun Sing, turut hadir Gubernur Lemhannas RI Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si.; Sekretaris Utama Lemhannas RI Drs. R. Z. Panca Putra S., M.Si.; Kepala Biro Kerja Sama dan Hukum Raja Erjan H.S. Girsang, S.E., M.M., M.Sc.; serta Tenaga Profesional Bidang Sumber Kekayaan Alam Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Dadan Umar Daihani, D.E.A.



KURSUS PEMANTAPAN PIMPINAN DAERAH ANGKATAN II

Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Angkatan II Resmi Ditutup

Kegiatan Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Angkatan II yang telah diselenggarakan selama dua minggu, resmi ditutup oleh Gubernur Lemhannas RI Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si di Gedung C Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri RI, pada Selasa (18/11). Acara tersebut didahului dengan pemaparan rencana aksi oleh tiga orang perwakilan peserta KPPD, yakni Wali Kota Bengkulu Dedy Wahyudi yang

membahas smart city, Bupati Pringsewu H. Riyanto Pamungkas membahas hilirisasi tepung mocaf, dan Wali Kota Ambon Bodewin Malkias Wattimena membahas pengelolaan sampah terpadu.

Wakil Menteri Kemendagri RI Bima Arya Sugiarto sampaikan rasa takjubnya pada tiga kepala daerah tersebut. Menurutnya, ketiga kepala daerah itu menunjukkan keberanian dengan mengambil langkah pada tiga isu yang selama ini belum

terselesaikan. Ide-ide tersebut merupakan hasil dari belajar di Lee Kuan Yew School of Public Policy yang berani menentukan target prioritas berdasarkan kriteria masing-masing. Bima Arya menekankan target-target tersebut harus dipahami oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerahnya hingga ke jenjang pelaksana.

Dikatakan Bima Arya, keberhasilan Singapura diperoleh dari kepemimpinan yang efektif dari masa ke masa.



Visi yang mengalir pada tiap generasi selalu berkelanjutan dan tidak terputus. Sejalan dengan hal tersebut, Bima Arya berharap peserta KPPD dapat mencontoh kepemimpinan Singapura.

"Please, keep on the track. Kalau Bapak Ibu yakin (program) sudah ada risetnya, kajiannya, landasan hukumnya jelas, apapun yang terjadi go ahead, kalau yakin bisa menyejahterakan warga Bapak Ibu sekalian saya selalu dukung," ujar Bima Arya. Bima Arya juga berharap seluruh peserta KPPD bisa mencetak legacy dan angkatan KPPD berikutnya dapat terinspirasi dari yang dilakukan peserta KPPD saat ini lewat rencana aksi yang nyata.

Menjelang penutupan acara, para peserta KPPD mengikuti prosesi penanggalan tanda peserta, penyematan pin, serta penyerahan sertifikat yang dilakukan oleh Gubernur Lemhannas RI bersama Bima Arya. Gubernur Lemhannas RI dalam sambutan tutupnya menyampaikan KPPD bukan kegiatan kursus biasa, melainkan investasi negara untuk mewujudkan dan membentuk pemimpin daerah yang negarawan, berkarakter kuat, berwawasan kebangsaan, serta memiliki integritas dan komitmen tinggi untuk memajukan daerah masing-masing serta mampu mengimplementasikan asta cita yang merupakan program besar Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Semua hal tersebut bisa dicapai dari peran dan komitmen pemimpin daerah.

Kegiatan KPPD diarahkan untuk mampu membentuk karakter kepala daerah yang negarawan, berintegritas, dengan memegang teguh etika, serta memiliki cara pandang yang komprehensif, integral, holistik, profesional, mampu membangun kerja sama serta mampu mengimplementasikan visi asta cita.

Dalam rangka memberi pemahaman tentang asta cita, para peserta selain diingatkan akan RPJMN 2025-2045, para peserta juga diajarkan dan diajak melihat secara langsung berbagai model pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar yang dilakukan oleh pemerintah Singapura agar mampu menyusun proyek unggulan daerah.

"Sebagai Gubernur Lemhannas RI, saya menekankan bahwa proyek unggulan yang telah saudara-saudara rancang bukanlah sekadar dokumen biasa, melainkan sebuah komitmen dari seorang pemimpin daerah yang telah mengikuti kursus pemantapan pimpinan daerah untuk memberikan segala ide, tenaga, dan pemikirannya bagi kesejahteraan masyarakat di wilayahnya," kata Gubernur Lemhannas RI. Oleh karena itu, Lemhannas RI dan Kemendagri, yang difasilitasi oleh Purnomo Yusgiantoro Center (PYC) ke depan perlu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala guna memastikan bahwa proyek unggulan daerah yang disusun benar-benar dijalankan, disempurnakan, dan memberikan dampak nyata kepada masyarakat.

Menutup sambutannya, Gubernur Lemhannas RI menyampaikan terima kasih dan apresiasinya kepada seluruh pihak yang telah mendukung terlaksananya KPPD Angkatan II tahun 2025 ini, khususnya kepada Bapak Menteri Dalam Negeri dan jajaran, Ketua Dewan Pembina PYC, dan terlebih khusus kepada Lee Kuan Yew School of Public Policy dan Yayasan Low Tuck Kwon yang telah memfasilitasi terlaksananya KPPD Angkatan II tahun 2025. Gubernur Lemhannas RI berharap kerja sama dan dukungan yang baik ini dapat dilanjutkan pada kursus pemantapan pimpinan daerah berikutnya yang akan dilaksanakan tahun 2026.

Alumni P3N Angkatan 26 Harus Menjadi Agen Perubahan dan Penggerak Perjalanan Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045

Program Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) Angkatan 26 Tahun 2025 Lemhannas RI resmi ditutup pada Selasa (2/12). Gubernur Lemhannas RI Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si. menyatakan bahwa sebanyak 89 Peserta P3N Angkatan 26 dinyatakan lulus dan berhak menerima Ijazah. Dua dari 89

peserta mendapatkan penghargaan Predikat Akademik Terbaik yang diraih oleh Irjen Pol Dr. Barito Mulyo Ratmono, S.H., S.I.K., M.Si. dan Predikat KKP Terbaik yang diraih oleh Brigjen Pol Muhammad Firman, S.I.K., M.Si.

"Indonesia membutuhkan pemimpin-pemimpin visioner yang mampu melihat

jauh ke depan dan berpikir secara komprehensif, integral, serta holistik," kata Gubernur Lemhannas RI. Untuk mewujudkan hal tersebut, Lemhannas RI merancang proses pendidikan yang bukan hanya sebuah program pendidikan biasa, tapi merupakan sebuah proses perjalanan pembentukan diri, pembentukan karakter, serta penguatan



jati diri kebangsaan. Diharapkan program pendidikan yang dirancang Lemhannas RI telah menghasilkan Alumni P3N Angkatan 26 Lemhannas RI yang memahami berbagai dinamika strategis dan dapat memberikan kontribusi nyata saat nantinya kembali ke instansi masing-masing.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Lemhannas RI memberikan beberapa pesan kepada seluruh Alumni P3N Angkatan 26. Pertama, para Alumni P3N Angkatan 26 merupakan pemimpin strategis nasional yang harus menjadi contoh, panutan, dan teladan bagi masyarakat dengan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak sesuai dengan empat konsensus dasar bangsa. Kedua, seluruh Alumni P3N Angkatan 26 harus terus memegang teguh integritas yang berpegang pada nilai kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Ketiga, para Alumni P3N Angkatan 26 harus menjadi pemimpin yang visioner dengan berani mengambil keputusan dan solutif terhadap berbagai persoalan bangsa. Keempat,

seluruh Alumni P3N Angkatan 26 harus meningkatkan kepekaan dan kepedulian terhadap perkembangan kondisi sosial masyarakat di lingkungan masing-masing. Kelima, Alumni P3N Angkatan 26 harus menjadi perekat persatuan bangsa, keberagaman yang ada harus dijadikan kekuatan bangsa.

“Saya meyakini, Alumni P3N Angkatan 26 akan menjadi agen perubahan, menjadi pelaku dan penggerak dalam perjalanan besar bangsa menuju Indonesia Emas 2045,” ucap Gubernur Lemhannas RI.

Menutup sambutannya, Gubernur Lemhannas RI juga menekankan bahwa pin dan status Alumni Lemhannas RI yang kini disandang para Alumni P3N Angkatan 26 diiringi dengan tanggung jawab yang melekat, yaitu untuk menjaga etika dalam setiap perilaku dan tindakan para alumni serta menjaga integritas sebagai pemimpin nasional. Oleh karena itu, Lemhannas RI akan terus memonitor dan memantau setiap pelaksanaan tugas

dan permasalahan yang dialami para alumni serta melakukan evaluasi terhadap penggunaan pin Alumni Lemhannas RI.

Berkaitan dengan status sebagai Alumni Lemhannas RI, Upacara Penutupan P3N Angkatan 26 Lemhannas RI kemudian dilanjutkan dengan Pengukuhan Dewan Pengurus Angkatan (DPA) IKAL-Lemhannas P3N 26 Masa Bakti Tahun 2025-2030. Wakil Ketua Umum I Dewan Pengurus Pusat Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas (DPP IKAL) Dr. Ir. Mustafa Abubakar, M.Si. melantik Irjen Pol Dr. Barito Mulyo Ratmono, S.H., S.I.K., M.Si. sebagai Ketua Pengurus Harian. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua Umum I DPP IKAL berpesan bahwa seluruh anggota IKAL harus berwatak pejuang dan berwawasan negarawan. Selain itu, Wakil Ketua Umum I DPP IKAL juga menekankan bahwa seluruh anggota IKAL harus menjadi katalisator kerukunan dan keutuhan bangsa guna menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.



ToT Lemhannas RI Berkontribusi Aktif dalam Menjaga Keutuhan Bangsa

Deputi Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas RI kembali menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Untuk Pelatih/ Training of Trainers (ToT) bagi dosen, guru dan widyaiswara angkatan ke-223 di Provinsi Jakarta di Ruang Pancasila, Lemhannas RI, pada Senin (24/11). Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Gubernur Lemhannas RI Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si.

Kegiatan ToT bertujuan untuk meningkatkan keterampilan (skill) dan menambah pengetahuan para pengajar di bidang nilai-nilai kebangsaan yang memiliki semangat dan kompetensi yang tinggi. Dari tujuan tersebut diharapkan dapat terwujud satu pemahaman yang kuat terhadap nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari 4 (empat) konsensus dasar bangsa pada masyarakat, khususnya peserta didik serta mampu mengimplementasikannya.

Di tengah arus globalisasi, disrupsi teknologi, dan perubahan sosial yang cepat, bangsa Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menjaga jati diri dan karakter kebangsaan. Melalui pelatihan yang berlangsung, para dosen, guru, dan widyaiswara diharapkan menjadi garda terdepan dalam membangun ekosistem pembelajaran yang berakar pada nilai-nilai luhur bangsa. "Pembelajaran yang berkarakter kebangsaan haruslah menyentuh dimensi



rasa, logika, dan jiwa peserta didik serta dilaksanakan secara efektif, inovatif, dan kontekstual,” ujar Gubernur Lemhannas RI.

Pelatihan tersebut dirancang sebagai bagian dari strategi nasional untuk mencetak generasi emas Indonesia 2045. Peserta akan dibekali dengan materi yang memperkuat keterampilan pedagogis, wawasan kebangsaan, dan metode pembelajaran yang relevan dengan tantangan zaman. Dari materi tersebut, peserta diharapkan dapat menjadi agen transformasi yang mampu menginternalisasi nilai-nilai kebangsaan ke dalam pola pikir, sikap, dan tindakan peserta didik.

Seluruh kegiatan klasikal, diskusi dan praktek mengajar dilaksanakan di Kantor Lemhannas RI. Sedangkan untuk manakrida dilaksanakan di Lapangan Batalyon Komando 461, Halim Perdanakusuma.

Selama kegiatan, peserta akan mendapat materi dasar, yakni wawasan nusantara, ketahanan nasional, kewaspadaan nasional dan kepemimpinan nasional. Selain materi dasar, peserta juga akan diberikan materi utama empat konsensus dasar bangsa (Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Sesanti Bhinneka Tunggal Ika). Adapun materi penunjang yang diberikan kepada peserta, yakni literasi digital, perkembangan lingkungan strategis, pengantar nilai-nilai kebangsaan dan sejarah perjalanan bangsa, interpersonal skill, dan lainnya.

Pelatihan ToT angkatan ke-223 yang berlangsung selama delapan hari tersebut, resmi ditutup pada Rabu, 3 Desember 2025 di Ruang Dwi Warna Purwa, Lemhannas RI. Kegiatan ToT berlangsung baik dan sejalan dengan tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan. Peserta dinilai mampu menyerap materi dengan baik dan bisa menjadi agen perubahan dalam menyebarkan nilai-nilai kebangsaan berdasarkan empat konsensus dasar

bangsa di tempat kerja masing-masing, lingkungan dan keluarga.

Menutup kegiatan ToT Angkatan ke-223, Gubernur Lemhannas RI mengingatkan tantangan terbesar bangsa Indonesia selain persaingan antar negara adalah disrupsi teknologi yang cepat. Perang fisik sudah tersorot di beberapa negara, namun yang lebih dirasakan saat ini adalah perang cyber. “Tantangan besar bagi kita adalah bagaimana memastikan jati diri dan kebangsaan kita pegang teguh di dalam kehidupan sehari-hari kita,” pungkasnya.

Di era digital, ToT berperan sebagai kompas moral penunjuk arah dalam membangun generasi pelajar keindonesiaan, berdaya saing global dan berkontribusi aktif dalam menjaga keutuhan bangsa. Gubernur Lemhannas RI berharap dari proses Latihan yang diikuti seluruh peserta menjadi garda terdepan dalam membangun ekosistem pembelajaran yang berakar pada nilai-nilai kebangsaan.



Refleksi Akhir Tahun 2025, Gubernur Lemhannas RI Siap Memperkuat Daya Lenting Bangsa Tahun 2026

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si. menyampaikan pernyataan akhir tahun dan rumusan arah kebijakan tahun 2026 yang bertempat di Ruang Dwi Warna Purwa, Gedung Panca Gatra pada Selasa (16/12). Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakil Gubernur Lemhannas RI, Para Deputy Lemhannas RI, Wakil Koordinator Tenaga Pengajar (Wakor Tajar), Wakil Koordinator Tenaga Pengkaji (Wakor Taji), dan Wakil Koordinator Tenaga Profesional (Wakor Taprof).

“Refleksi akhir tahun ini menjadi momentum yang strategis, tidak hanya untuk melakukan evaluasi menyeluruh atas capaian Lemhannas RI, tetapi juga untuk merumuskan arah kebijakan strategi dalam menghadapi tahun 2026 yang menuntut kerja semakin terkoordinasi, responsif, dan inovatif,” ujar Gubernur Lemhannas RI. Sepanjang tahun 2025, Lemhannas RI telah memenuhi empat tugas utama secara konsisten sebagai Center of Excellence, yaitu Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N), Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N), pengkajian strategis, pemantapan nilai-nilai kebangsaan, dan pengukuran indeks ketahanan nasional.

Pada bidang pengkajian, Lemhannas RI melaksanakan kajian yang berfokus pada isu-isu fundamental ketahanan nasional, seperti geopolitik, geoekonomi, peningkatan kualitas SDM unggul berbasis science, technology, engineering, dan math (STEM), hilirisasi, konsolidasi demokrasi dan reformasi sistem politik di Indonesia. Hasil dari kajian strategis tersebut, menjadi masukan penting bagi Presiden, Kementerian/Lembaga dan para pemangku kepentingan nasional dalam menjaga stabilitas, memperkuat ketahanan, serta menavigasi peluang pembangunan.

Tugas selanjutnya adalah melaksanakan pemantapan nilai-nilai kebangsaan yang tonggak penting dalam perluasan internalisasi nilai-nilai kebangsaan, serta pengukuran indeks ketahanan nasional dan kepemimpinan nasional yang terus dimutakhirkan dan diselaraskan dengan perkembangan zaman di tingkat global dan nasional.

Lemhannas RI menilai bahwa ketahanan nasional Indonesia sepanjang tahun 2025 berada pada kondisi cukup tangguh dengan skor 2,84 dengan tren penguatan yang stabil. Berdasarkan refleksi strategis sepanjang tahun 2025, Lemhannas RI

menyimpulkan bahwa stabilitas nasional secara umum tetap terjaga dalam bingkai konsolidasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam menghadapi tahun 2026, Indonesia masih diwarnai berbagai dinamika, meliputi rivalitas kekuatan besar, isu ketahanan nasional, perubahan iklim tetap yang menjadi tantangan multidimensional dan perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI). Oleh karena itu, tahun 2026 harus menjadi tahun percepatan pembangunan nasional dan peningkatan peran diplomasi internasional. ketahanan nasional yang cukup tangguh pada 2025 harus dijadikan modal strategis untuk memperkokoh karakter bangsa, menjaga keberlanjutan pembangunan, serta memperkokoh karakter bangsa, menjaga keberlanjutan pembangunan, serta memperluas kepemimpinan Indonesia di panggung internasional pada tahun-tahun mendatang.

“Tahun 2026 tidak boleh hanya dipandang sebagai kelanjutan agenda pembangunan, tetapi juga sebagai fase konsolidasi nasional untuk memperkuat daya lenting bangsa menghadapi ketidakpastian,” tegas Gubernur Lemhannas RI menutup pernyataan akhir tahun 2025.

Lemhannas RI Berhasil Mempertahankan Predikat Informatif untuk Keempat Kalinya

Lemhannas RI berhasil mempertahankan predikat Informatif untuk ke-4 kalinya secara berturut-turut dalam Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat (KI Pusat). Penghargaan ini menjadi bukti komitmen Lemhannas RI dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik dan meningkatkan akuntabilitas lembaga negara.

Penghargaan diserahkan pada acara Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dan Launching Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Tahun 2025, yang berlangsung di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (15/12). Sekretaris Utama Lemhannas RI, Komjen Pol. Drs. R.Z. Panca Putra S., M.Si., hadir secara langsung untuk menerima apresiasi

pada kategori Badan Publik Informatif untuk Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian.

Anugerah Komisi Informasi Pusat sendiri merupakan penghargaan tingkat nasional yang diberikan kepada badan publik yang menunjukkan komitmen dan kinerja optimal dalam penerapan keterbukaan informasi publik. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia.

Penganugerahan KIP diselenggarakan setiap tahun berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Melalui Monev, KI Pusat menilai sejauh mana badan publik menjalankan kewajiban

menyediakan dan melayani informasi kepada masyarakat secara terbuka, cepat, dan bertanggung jawab. Hasil penilaian kemudian diklasifikasikan ke dalam beberapa predikat, mulai dari Informatif hingga Tidak Informatif.

Melalui Anugerah KIP, KI Pusat berharap keterbukaan informasi tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi menjadi bagian dari budaya kerja dan pelayanan publik. Penghargaan ini sekaligus mendorong pimpinan badan publik untuk memperkuat komitmen dalam menjamin hak masyarakat atas informasi demi terciptanya pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Keberhasilan Lemhannas RI menerima predikat Informatif diharapkan menjadi contoh bagi lembaga lain dalam meningkatkan kualitas layanan informasi publik.



MEMAKNAI BELA NEGARA BAGI INSAN ROBOTIKA GUNA PENGUASAAN TEKNOLOGI TERKINI DALAM RANGKA MENUJU GENERASI INDONESIA EMAS

Kolonel Laut (KH) Sunarto, S.T., M.AP

Staf Ahli Komando Armada RI

Pendahuluan.

Hari Bela Negara adalah salah satu hari peringatan nasional yang memiliki bobot sejarah sangat krusial bagi eksistensi Republik Indonesia. Peringatan ini hadir bukan sekadar sebagai ritual tahunan, melainkan sebagai pengingat kuat akan tekad bangsa untuk mempertahankan kemerdekaan di tengah gempuran ancaman. Diperingati setiap tanggal 19 Desember, momen ini mengajak seluruh elemen masyarakat untuk merefleksikan kembali kontribusi mereka terhadap tanah air. Dalam konteks modern, semangat ini tidak lagi terbatas pada perjuangan fisik, melainkan bertransformasi menjadi kesiapan mental dan spiritual untuk menghadapi tantangan global yang semakin kompleks demi kemajuan bangsa.

Memaknai Hari Bela Negara di era kontemporer tidak harus diartikan sebagai kewajiban memanggul senjata atau masuk ke dalam dinas militer. Makna bela negara telah meluas menjadi sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pada tahun 2025 ini, tema yang diusung adalah "Teguhkan Bela Negara untuk Indonesia Maju". Tema ini menyiratkan bahwa membela negara berarti berkontribusi secara produktif untuk kemajuan bangsa. Bela negara adalah tentang membangun ketahanan nasional melalui profesi dan keahlian masing-masing.

Pencapaian dan Harapan Tahun 2045.

Pada tahun 2045, Indonesia akan merayakan satu abad kemerdekaannya, yang menjadi tonggak sejarah penting dalam perjalanan bangsa. Perayaan ini dapat dianggap sebagai momen emas bagi bangsa Indonesia, tidak hanya untuk mengenang ISSN : 3062-6900 (elektronik) 237 perjuangan kemerdekaan, tetapi juga sebagai momentum refleksi dan proyeksi menuju masa depan yang lebih maju. Dalam rentang waktu 100 tahun sejak merdeka, Indonesia bercita-cita mewujudkan berbagai pencapaian strategis di berbagai bidang, termasuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai pilar utama dalam

mendorong kemajuan bangsa.

Pengembangan sains dan teknologi menjadi aspek yang sangat esensial dalam upaya mencapai kesejahteraan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan (Lase et al., 2024). Hal ini sejalan dengan visi Indonesia untuk menjadi negara maju yang mampu bersaing secara global. Investasi dalam riset, inovasi, dan pendidikan tinggi di bidang teknologi diharapkan dapat menciptakan solusi nyata bagi tantangan nasional, seperti peningkatan kualitas hidup, pengurangan ketimpangan, dan pengembangan industri berbasis teknologi modern (Khoirudin & Mulyadi, 2024). Salah satu ilmu yang memiliki keterkaitan dengan teknologi adalah robotika. Robotika telah menjadi sorotan utama dalam perkembangan teknologi modern, memperkenalkan kita pada era dimana mesin-mesin cerdas tidak lagi hanya fiksi ilmiah, tetapi kenyataan yang mampu mengubah cara kita hidup dan bekerja. Dari asal-usul kata "robot" yang bermakna pekerja tanpa lelah dalam bahasa Cheko (Nafisah et al., 2024).

Pada dasarnya, robotika adalah bidang studi yang memfokuskan pada pembuatan, pengembangan, dan aplikasi robot. Namun, definisi ini jauh lebih dari sekadar benda-benda mekanik; ini adalah cerminan dari kecerdasan buatan yang terus berkembang dan menjadi bagian tak terpisahkan dari masyarakat masa depan (Huda & Sri Pudjarti, 2024). Pembelajaran mengenai robotika tidak hanya di dapat di perguruan tinggi, bahkan di jenjang pendidikan sekolah menengah atas sudah mulai diajarkan terutama di sekolah menengah kejuruan, karena merupakan materi yang sangat berguna untuk menunjang keterampilan siswa di masa depan (Setiawan et al., 2024). Kegiatan ini merupakan upaya strategis dalam mengenalkan dan mengembangkan keterampilan teknologi digital bagi sumber daya manusia yang kompetitif (Adiguna et al., 2024).

Potensi Gen Z Indonesia di Era Digitalisasi.

Berdasarkan data dari Newzoo, pada tahun 2024 pengguna ponsel pintar di seluruh dunia mencapai 7,21 milyar dan Indonesia menduduki peringkat ke 4 dengan 187,7 juta pengguna ponsel pintar dari sekitar 275,5 juta penduduk Indonesia atau lebih kurang 68,1 persen. BPS mencatat pada tahun 2024 bahwa pengguna telepon seluler (HP) di Indonesia mencapai sekitar 82,05 persen.

Sementara itu penggunaan internet tercatat 72,78 persen pada populasi yang sama. Data tahun 2025 menunjukkan jumlah pengguna media sosial Indonesia sebanyak 143 juta identitas pengguna aktif, yang setara dengan sekitar 50,2

persen dari total penduduk Indonesia yang mencapai 285 juta jiwa di awal tahun 2025, dan ini merupakan asset bangsa yang harus diberdayakan secara maksimal menuju arah yang positif.

Dengan melihat kondisi demikian, hal ini menjadi tugas dan kewajiban negara, guna memelihara, merawat serta membina Generasi Emas bangsa untuk menjadi kekuatan SDM yang terlatih serta memiliki jiwa Patriotisme bangsa serta Cinta Tanah Air.

Era Globalisasi dan Teknologi Robotika.

Di era globalisasi saat sekarang ini kemajuan teknologi berkembang sangat pesat, telah banyak diciptakan suatu teknologi baru yang dapat membantu pekerjaan manusia. Salah satu bentuk dari berkembangnya teknologi tersebut adalah robot. Secara umum robot didefinisikan sebagai sebuah piranti mekanik yang mampu melakukan pekerjaan manusia atau berperilaku seperti manusia. Robotika merupakan bidang ilmu yang mempelajari tentang struktur dan prinsip kerja dari robot, mulai dari sensor robot, mekanik robot dan otak robot. Kemajuan teknologi terus berkembang pesat sampai di berbagai bidang. Kemajuan teknologi yang sedang berkembang saat ini identik dengan perkembangan teknologi otomasi dan robotika.

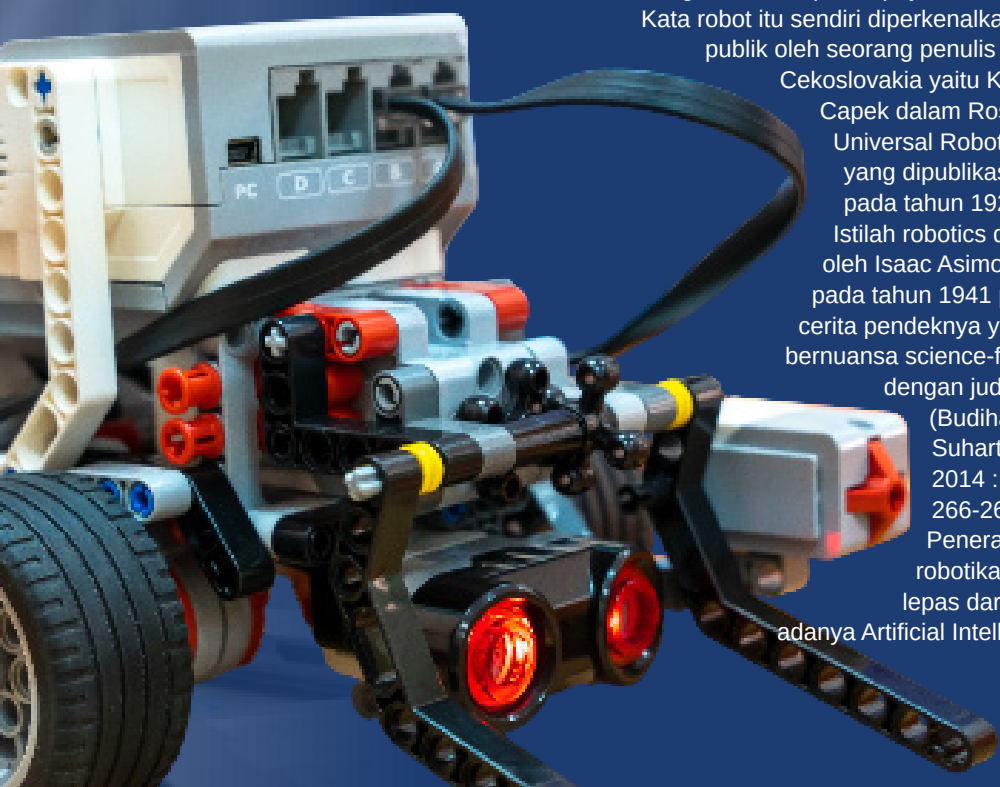
Kata robot sudah tidak asing lagi didengar oleh kita. Kata robot berasal dari bahasa Czech "robota" yang memiliki arti bekerja (Budiharto & Suhartono, 2014:280). Robot adalah physical agent yang mengerjakan tugas dengan memanipulasi physical world. Kata robot itu sendiri diperkenalkan ke publik oleh seorang penulis dari Cekoslovakia yaitu Karel Capek dalam Rossum's Universal Robots yang dipublikasikan pada tahun 1920. Istilah robotics diawali oleh Isaac Asimov pada tahun 1941 pada cerita pendeknya yang bernuansa science-fiction dengan judul Liar (Budiharto & Suhartono, 2014 : 266-267). Penerapan robotika tidak lepas dari adanya Artificial Intelligence

(AI). AI merupakan bidang ilmu komputer yang mempunyai peran penting di era kini dan masa akan datang. Bidang ini telah berkembang sangat pesat di 20 tahun terakhir seiring dengan pertumbuhan kebutuhan akan perangkat cerdas pada industri rumah tangga (Budiharto & Suhartono, 2014 : 2).

Kata intelligence berasal dari bahasa Latin intelligo yang berarti „saya paham“. Jadi, dasar dari intelligence adalah kemampuan memahami dan melakukan aksi. Sebenarnya area AI bermula dari kemunculan komputer sekitar tahun 1940-an, meskipun sejarah perkembangannya dapat dilacak hingga zaman Mesir Kuno (Budiharto & Suhartono, 2014:3). Sebagian kalangan menerjemahkan AI sebagai kecerdasan buatan, kecerdasan artifisial, inteligensia artifisial, atau inteligensia buatan. Para ilmuwan memiliki dua cara pandang yang berbeda tentang AI. Yang pertama adalah memandang AI sebagai bidang ilmu yang hanya fokus pada proses berpikir.

Sedangkan yang ke dua adalah memandang AI sebagai ilmu yang fokus pada tingkah laku. Cara pandang ke dua dinilai memandang AI secara lebih luas, karena suatu tingkah laku selalu didahului dengan proses berpikir (Suyanto, 2011:10). Definisi AI yang paling tepat untuk saat ini adalah acting rationally dengan pendekatan rational agent. Acting rationally merupakan cara melakukan aksi secara rasional dengan menalar secara logis. Dengan menalar secara logis, maka bisa didapatkan kesimpulan bahwa aksi yang diberikan akan mencapai tujuan atau tidak. Jika mencapai tujuan, maka agent dapat melakukan aksi berdasarkan kesimpulan tersebut (Suyanto, 2011:3).

Perkembangan kecerdasan buatan ini sangat penting baik di masa kini maupun masa yang akan datang. Hampir semua perangkat komputer dan perangkat elektronika canggih menerapkan kecerdasan buatan untuk membuat system lebih handal. Di masa yang akan datang, diperkirakan semua perangkat elektronika dan komputer menjadi jauh lebih cerdas karena telah ditanamkan teknologi yang mempermudah kehidupan manusia. Perkembangan robotika telah mengalami kemajuan yang sangat mengagumkan yang ditandai dengan pengembangan berbagai jenis robot yang digunakan dalam bidang medis, penerbangan, konstruksi, pemindaian wilayah, pertanian, dan jasa lainnya. Robot tidak harus berstruktur menyerupai manusia (humanoid). Namun, yang jelas, robot ini diciptakan untuk



memudahkan atau membant manusia melakukan berbagai kegiatannya, termasuk juga kegiatan yang sangat berisiko bagi keselamatan atau kesehatan penggunaannya. Di dunia penerbangan, terdapat pesawat tanpa awak yang digunakan untuk berbagai keperluan.

Potensi Generasi Muda Indonesia di Kancah Global.

Meskipun telah banyak kemajuan, perjalanan Indonesia menuju puncak robotika global masih panjang. Ada beberapa tantangan yang perlu diatasi, termasuk ketersediaan infrastruktur yang memadai, aksesibilitas pelatihan berkualitas tinggi di seluruh pelosok negeri, dan dukungan industri yang lebih kuat untuk mengkomersialkan inovasi yang dihasilkan dari pelatihan dan kompetisi.

Namun, di balik setiap tantangan, ada peluang besar. Dengan populasi muda yang besar dan semangat inovasi yang tinggi, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi pemain kunci dalam industri robotika global. Pemerintah, institusi pendidikan, dan sektor swasta harus bekerja sama untuk menciptakan kebijakan yang mendukung, kegiatan pelatihan yang relevan, dan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekosistem robotika.

Salah satu momen yang membanggakan adalah, Tim Robotika Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) kembali memboyong prestasi membanggakan di ajang kompetisi tingkat internasional. Kali ini, melalui kompetisi Federation of International Robot Association (FIRA) Roboworld Cup 2025 yang diselenggarakan di Exco, Daegu, Korea Selatan, mulai 11 – 15 Agustus 2025

yang lalu. ITS berhasil meraih juara 1 Autonomous Car Challenge Physic Pro, juara 1 Autonomous Car Challenge kategori Race, dan juara 2 Autonomous Car Challenge kategori Urban.

Peluang lainnya terletak pada pengembangan robotika yang spesifik untuk kebutuhan lokal, seperti robotika untuk pertanian, maritim, atau penanganan bencana alam yang sering terjadi di Indonesia. Dengan fokus pada solusi yang relevan secara lokal, kita tidak hanya dapat memecahkan masalah domestik tetapi juga menciptakan produk dan layanan yang dapat diekspor ke pasar global.

Ancaman Cyber Warfare.

Dinamika keamanan yang semakin kompleks dan ancaman non- konvensional seperti cyber warfare menambah kompleksitas pencapaian sasaran kegiatan bela negara bagi Generasi Muda Insan Robotika. Perubahan cepat dalam geopolitik menuntut adaptasi strategi yang lebih cepat dan terarah. Ketidakesetaraan dalam pendidikan dan pelatihan militer di berbagai lapisan masyarakat menjadi faktor yang tidak dapat diabaikan. Akses yang tidak merata terhadap pendidikan dan pelatihan bela negara dapat menciptakan kesenjangan dalam keterlibatan masyarakat.

Dalam mengatasi kendala-kendala tersebut, diperlukan peningkatan komunikasi, pendekatan inklusif, serta alokasi sumber daya yang tepat menjadi kunci dalam menjembatani kesenjangan dan memastikan Kegiatan Bela Negara bagi Generasi Muda Insan Robotika mencapai sasaran sesuai yang dikegiatankan oleh Kemhan. Salah satu

sasaran utamanya adalah meningkatkan kesadaran akan pentingnya peran serta generasi muda dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Melalui kegiatan ini, generasi muda diharapkan dapat memahami nilai-nilai kebangsaan, semangat patriotisme, dan rasa cinta tanah air yang mendalam.

Sasaran dari kegiatan bela negara bagi Generasi Muda Insan Robotika adalah mencapai seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasinya dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Diperlukan menetapkan target konkret, seperti peningkatan jumlah partisipan dan tingkat kesadaran masyarakat, yang digunakan sebagai indikator keberhasilan kegiatan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan berbagai kegiatan, termasuk kampanye sosialisasi, pendidikan, pelatihan, dan kerjasama dengan berbagai pihak terkait. Selain itu, perlu menetapkan target jumlah kader bela negara yang diharapkan dapat menjadi agen perubahan dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Secara keseluruhan, strategi pencapaian kegiatan bela negara bagi Generasi Muda Insan Robotika yang diimplementasikan perlu mencerminkan pendekatan yang sesuai dengan teori bernegara, dengan mengintegrasikan metode, sasaran, dan target yang telah ditetapkan untuk memastikan kesadaran, partisipasi, dan kesiapan generasi muda serta masyarakat umum dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Namun memerlukan beberapa perbaikan dan saran untuk peningkatan dalam implementasi kegiatan bela negara, serta pengembangan strategi untuk meningkatkan efektivitas dan dampaknya dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara.

Kegiatan Bela Negara bagi Generasi Muda Insan Robotika.

Dalam pencapaian kegiatan bela negara bagi Generasi Muda Insan Robotika, penting untuk mempertimbangkan berbagai faktor kunci yang memengaruhi keberhasilannya. Perspektif yang meliputi metode, sasaran, dan target menjadi landasan utama dalam menilai efektivitas kegiatan ini. Dengan memahami bagaimana metode pelaksanaan digunakan, sejauh mana sasaran telah tercapai, dan seberapa baik target-target telah dipenuhi, dapat diukur dampak sebenarnya dari upaya-upaya bela negara dalam membangun kesadaran dan semangat bela negara di kalangan generasi muda. Dari segi metode, evaluasi



Sumber: Tim Robotika ITS Borong 16 Prestasi di Kancah Internasional - SCIENCE TECHNO PARK.

mencakup penelusuran atas keberhasilan strategi yang diterapkan dalam menyebarkan nilai-nilai bela negara. Ini mencakup penilaian terhadap keefektifan kampanye informasi, pelatihan, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang digunakan untuk melibatkan masyarakat dalam aktivitas yang memperkuat semangat bela negara.

Masih juga berbicara salah satu prestasi yang diraih putra bangsa, dua dosen Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (UPNVJ) mencatatkan prestasi membanggakan pada ajang Hi-Tech BRICS Skill Competition 2025 di Yekaterinburg, Rusia. Kompetisi yang mempertemukan talenta teknologi tinggi dari berbagai negara ini menjadi panggung penting bagi pengembangan keterampilan industri masa depan. Prestasi lain datang dari Dr. Didit Widiyanto, S.Kom., M.Si. dari Fakultas Ilmu Komputer yang memperoleh Juara 3 kategori Drone Assembling. Keahliannya dalam perakitan drone, integrasi sistem kontrol, dan optimasi performa perangkat tak berawak menjadikannya salah satu peserta terbaik di bidang teknologi robotik dan aeronautika.

Sementara itu, dalam meninjau sasaran, evaluasi akan memeriksa sejauh mana kegiatan bela negara telah mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Ini melibatkan penilaian terhadap pencapaian target-target yang spesifik, seperti meningkatnya partisipasi generasi muda dalam kegiatan bela negara, peningkatan

dalam pemahaman akan nilai-nilai kebangsaan, atau perubahan perilaku yang mendukung pertahanan negara. Demikian juga dari perspektif target, penting untuk mengevaluasi sejauh mana kegiatan bela negara telah mencapai target-target yang telah ditetapkan.

Melalui pendekatan holistik ini, dapat diharapkan bahwa upaya bela negara akan mengukir jejak signifikan dalam memperkuat kedaulatan dan keberlanjutan bangsa. Mengadopsi pendekatan holistik ini, upaya bela negara diharapkan mampu membawa dampak yang monumental dalam memperkuat kedaulatan dan keberlanjutan bangsa. Melalui penerapan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan partisipasi aktif generasi muda sebagai sasaran kegiatan, diharapkan bahwa kegiatan bela negara tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga menjadi gerakan inklusif yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat terutama bagi Generasi Muda Insan Robotika.

Adapun evaluasi dilakukan bertujuan melihat efektif atau tidaknya strategi kegiatan bela negara dalam memperkuat jati diri bangsa dan memastikan kesiapan dan keberlangsungan negara dalam menghadapi tantangan zaman yang terus berkembang ditinjau dari berbagai aspek.

Kegiatan Bela Negara dari Segi Potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan

Dalam mengevaluasi pencapaian kegiatan bela negara bagi Generasi Muda Insan Robotika, tidak hanya penting untuk memperhitungkan capaian positifnya, tetapi juga untuk mengidentifikasi potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang mungkin menghambat kesuksesannya. Dengan memahami dengan jelas berbagai faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan ini, kita dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memperbaiki strategi, meminimalkan risiko, dan memastikan keberlanjutan upaya-upaya dalam membangun kesadaran dan semangat bela negara di kalangan masyarakat. Dalam menghadapi dinamika kompleks dunia modern, upaya untuk memperkuat kesadaran dan kesiapsiagaan nasional menjadi sangat penting. Melalui kegiatan bela negara bagi Generasi Muda Insan Robotika, dapat tercipta terbangunnya fondasi yang kokoh bagi ketahanan negara, menghadapi berbagai potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang mungkin mengancam keutuhan dan kedaulatan bangsa.

Potensi ancaman yang beragam, mulai dari ancaman militer tradisional hingga ancaman non-militer seperti cyber warfare, terus menghadirkan tantangan yang kompleks bagi keamanan dan pertahanan negara. Untuk menghadapi dinamika ini, perlu strategi yang holistik dan proaktif. Metode yang diterapkan mencakup pendekatan edukatif, pelatihan, serta penguatan kerja sama lintas sektor. Sasaran utama dari kegiatan bela negara adalah meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan seluruh komponen bangsa dalam menghadapi potensi ancaman. Melalui pendekatan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih responsif dan siaga terhadap ancaman yang muncul.

Adapun target yang diharapkan mencakup peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan bela negara, peningkatan tingkat kewaspadaan terhadap berbagai potensi ancaman, serta peningkatan kemampuan untuk bertindak responsif dalam mengatasi gangguan dan hambatan yang mungkin muncul. Dengan demikian, kegiatan bela negara bukan hanya sekedar upaya untuk menghadapi potensi ancaman, tetapi juga merupakan wujud dari komitmen bersama untuk membangun fondasi yang kokoh bagi keamanan, stabilitas, dan kedaulatan negara bagi Generasi Muda Insan Robotika.

Parameter Keberhasilan Bela Negara bagi generasi muda Insan robotika Nasional.

Pendidikan dan pelatihan bela negara bagi Generasi Muda Insan Robotika merupakan sebuah tonggak penting dalam upaya membangun kesadaran dan keterlibatan aktif dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Dalam mengevaluasi pencapaian kegiatan ini, perlu dilihat sejauh mana keberhasilan dan efektivitasnya dalam membentuk karakter serta memperkuat kesiapan generasi muda Insan robotika Nasional dalam menghadapi tantangan dan ancaman terkini yang dihadapi oleh negara. Dengan mempertimbangkan peran kunci pendidikan dan pelatihan

Indonesia, termasuk dalam hal agama, suku, bahasa, dan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan menjadi suatu keharusan yang sangat penting. Terlebih lagi, Indonesia terdiri dari berbagai kepulauan yang terpisah namun terhubung oleh lautan. Dengan demikian, pendidikan dan pelatihan ini haruslah menyelaraskan nilai-nilai keinsan robotika Nasional dengan prinsip-prinsip kebangsaan, menciptakan sinergi yang kuat antara identitas agama dan identitas nasional.



Sumber: <https://www.navaswara.com/read/2025/11/18/upnvj-torehkan-prestasi-internasional-lewat-keberhasilan-dua-dosen-di-rusia/>

Pendidikan dan pelatihan bela negara memiliki relevansi yang sangat penting bagi generasi muda Insan robotika Nasional, mengingat hal itu bukan hanya tentang pembinaan pertahanan negara, tetapi juga tentang meningkatkan pemahaman mereka tentang nilai-nilai Insan robotika Nasional yang mendorong kewajiban terhadap tanah air dan bangsa. Dalam konteks ini, pendidikan bela negara bagi Generasi Muda Insan Robotika menjadi alat yang strategis untuk mengimplikasikan ajaran-ajaran tentang kecintaan terhadap tanah air dan kewajiban terhadap sesama. Pendidikan bela negara bagi generasi muda Insan robotika Nasional bukan hanya sekadar upaya untuk membangun kesadaran berbangsa dan bernegara yang sejalan dengan ajaran agama, tetapi juga merupakan wujud dari komitmen mereka dalam memperkuat keutuhan dan keamanan negara.

Melalui pendidikan ini, nilai-nilai patriotisme, cinta tanah air, dan pengamalan ajaran Insan robotika Nasional tentang keadilan dan kemanusiaan dapat ditanamkan secara efektif dalam jiwa generasi muda. Generasi muda Insan robotika Nasional tidak hanya menjadi warga negara yang loyal, tetapi juga menjadi agen perubahan yang aktif dalam membangun bangsa yang kokoh dan damai. Pendidikan bela negara menjadi wahana yang efektif untuk mempersatukan nilai-nilai agama dan kebangsaan, sehingga generasi muda dapat tumbuh dan berkembang sebagai individu yang berkontribusi positif dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional, sesuai dengan ajaran agama mereka.

Keberhasilan kegiatan bela negara bagi Generasi Muda Insan Robotika dalam konteks ini dapat diukur melalui sejumlah parameter, termasuk partisipasi aktif generasi muda Insan robotika Nasional dalam kegiatan-kegiatan bela negara, pemahaman mendalam akan nilai-nilai kebangsaan dan keinsan robotika Nasional, serta kemampuan untuk bertindak secara proaktif dalam menjaga kedaulatan negara dan menghadapi berbagai ancaman yang mungkin timbul. Efektivitas pendidikan dan pelatihan bela negara bagi generasi muda Insan robotika Nasional juga tercermin dalam kemampuan mereka untuk berkontribusi secara positif dalam pembangunan dan pertahanan negara, baik melalui keterlibatan dalam dinamika sosial, politik, maupun ekonomi, maupun melalui kesiapan mereka dalam menghadapi situasi darurat atau ancaman keamanan.

Dengan demikian, strategi pencapaian kegiatan bela negara dalam perspektif keberhasilan dan efektivitas pendidikan dan pelatihan bela negara bagi generasi muda Insan robotika Nasional haruslah mengutamakan pendekatan holistik yang mengintegrasikan nilai-nilai agama dan kebangsaan, serta memberikan ruang bagi partisipasi aktif dan pengembangan keterampilan yang relevan.

Dengan pendekatan sederhana ini, kegiatan bela negara dapat memberikan dampak yang signifikan dalam membentuk generasi muda Insan robotika Nasional yang tangguh, bertanggung jawab, dan siap menghadapi berbagai tantangan di masa depan.

Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara bagi generasi muda Insan robotika Nasional.

Pendidikan dan pelatihan bela negara merupakan fondasi utama dalam membentuk karakter dan kesadaran patriotik generasi muda Insan robotika Nasional terhadap tanah airnya. Dalam proses pendidikan dan pelatihan ini, generasi muda diperkenalkan dengan nilai-nilai kebangsaan, keutuhan wilayah, dan keamanan negara yang menjadi inti dari eksistensi dan kedaulatan sebuah negara. Hakekat dari pendidikan dan pelatihan bela negara bagi Generasi Muda Insan Robotika bertujuan untuk menumbuhkan sikap cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, menyakini Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara serta memiliki kemampuan awal bela negara.³ Terntunya melalui pemahaman yang mendalam tentang sejarah, budaya, dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa ini, generasi muda memperoleh landasan yang kokoh untuk mencintai tanah airnya dengan lebih mendalam.

Pada dasarnya, cinta tanah air adalah kebanggaan menjadi bagian dari tanah air dan bangsa yang mendorong seseorang untuk berusaha meningkatkan reputasi dan citra positif negaranya. Cinta tanah air, atau nasionalisme, mencakup perasaan kebanggaan, kepemilikan, penghargaan, rasa hormat, dan loyalitas terhadap negara tempat seseorang tinggal terutama bagi Generasi Muda Insan Robotika. Hal ini tercermin dalam perilaku yang mencakup membela, menjaga, dan melindungi tanah air, bersedia berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, serta melestarikan budaya, adat istiadat, alam, dan lingkungan hidup negaranya.

Kesimpulan.

Bela Negara bagi Generasi Muda Insan Robotika dapat ditarik kesimpulan bahwa:

Generasi Muda Insan Robotika, sekalipun telah meraih prestasi di kancah Internasional, serta mendapat pengakuan dari dunia, diharapkan masih memiliki jiwa Patriotisme bangsa, Cinta Tanah Air dan tetap bangga menjadi Warga Negara Indonesia.

Kita harus memiliki jiwa Bela Negara sebagai pilar utama yang menjadikan kita tangguh dan cerdas dalam menghadapi situasi yang tidak menentu. Semangat Bela Negara bukan hanya tanggung jawab aparat pertahanan, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat. Ini adalah tugas kita bersama dalam menjaga kesatuan dan persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelaksanaan atau tempat diselenggarakan Bela Negara, secara dinamis dapat dilaksanakan di Sekolah, Kampus, instansi Pemerintah, TNI Polri atau Lembaga lainnya, serta dapat dilaksanakan secara Online/Offline ataupun Virtual.

Kegiatan bela negara dapat memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap komitmen generasi muda Insan robotika Nasional dalam kehidupan bernegara. Melalui kegiatan ini, harapannya generasi muda Insan robotika Nasional memiliki kesadaran dan semangat bela negara yang tinggi, mampu mengembangkan keterampilan pertahanan diri dan menginternalisasi nilai-nilai kebangsaan.

Masa depan robotika Indonesia sangat cerah, terbukti sering menjuarai event-event Internasional, upaya kita terus menerus berinvestasi pada sumber daya manusia, membangun infrastruktur yang kuat, dan mendorong kolaborasi antara semua pemangku kepentingan. Dengan semangat pantang menyerah dan komitmen untuk terus belajar dan berinovasi, Indonesia pasti akan menjadi pemain utama di panggung robotika global.

Pelaksanaan atau penyelenggaraan Bela Negara di Indonesia bukan hanya terkait pada aspek militer tetapi harus lebih luas lagi, merangkul semua lapisan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Setiap tindakan, sekecil apapun, yang dilandasi cinta kepada bangsa dan negara, cinta kepada Pancasila dan NKRI adalah wujud konkrit Bela Negara. Dan SDM tenaga pengajar atau pelatihan Bela Negara di Indonesia sangat mumpuni.



Penguatan Strategi Dan Kolaborasi Mewujudkan Indonesia Bersinar Melalui Pendekatan *War On Drugs For Humanity* Dalam Rangka Meningkatkan Ketahanan Nasional

Komjen Pol. Suyudi Ario Seto, S.I.K., M.Si.

Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia

Latar belakang

Kerangka kebijakan nasional

Masalah narkoba bukan lagi sekadar permasalahan hukum. Ini adalah ancaman serius terhadap ketahanan bangsa, terhadap masa depan generasi muda, dan terhadap nilai-nilai moral yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti kita ketahui bersama bahwa 5-10 tahun ke depan, Indonesia akan mengalami puncak bonus demografi di mana 68,3% total penduduk Indonesia berusia produktif (bps,2022). Bonus demografi hanya akan terjadi satu kali dalam peradaban sebuah negara, ini bisa menjadi anugerah, tetapi bisa juga menjadi sebuah bencana jika pemerintah Indonesia tidak bisa mengelola bonus demografi tersebut. Pemberantasan narkoba merupakan agenda nasional yang sangat krusial karena peredaran gelap narkotika telah menjadi ancaman kesehatan, sosial, ekonomi, keamanan, dan kedaulatan bangsa. Indonesia, dengan jumlah penduduk besar dan letak geografis strategis, negara Indonesia menjadi target peredaran jaringan narkoba internasional.

Presiden Prabowo Subianto melalui program Asta Cita telah menegaskan bahwa komitmen pemerintah dalam menangani masalah narkoba menjadi salah satu misi utama, yaitu Asta Cita poin ke-7. Hal ini menunjukkan bahwa pemberantasan narkoba bukan sekadar isu kesehatan, tetapi juga merupakan bagian integral dari reformasi sistem hukum dan tata kelola pemerintahan. Strategi ini sejalan dengan upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045, di mana generasi muda terbebas dari bahaya narkoba agar dapat berkontribusi penuh dalam pembangunan bangsa. Visi Indonesia Emas 2045 dirumuskan sebagai respons terhadap megatren global dan tantangan lintas sektor yang semakin kompleks, serta menjadi arah transformasi menuju Indonesia sebagai negara

maju yang berdaya saing tinggi di tingkat global. Salah satu modal utama Indonesia dalam mewujudkan visi tersebut adalah jumlah penduduk yang besar. Jika dikelola dengan baik, potensi demografis ini dapat menjadi motor penggerak produktivitas dan kemajuan ekonomi. Bonus demografi diperkirakan akan mencapai puncaknya dalam kurun 15 tahun mendatang, dengan proporsi penduduk usia produktif mencapai 68%-70% dari total populasi. Kondisi ini membuka peluang besar untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun, tanpa pengelolaan yang tepat, bonus demografi justru berpotensi menjadi beban pembangunan melalui peningkatan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan sosial, serta tekanan terhadap lingkungan hidup dan sumber daya alam.

BNN sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, memiliki peran strategis dalam peta jalan menuju Indonesia Emas 2045. Peran tersebut selaras dengan dua dari delapan misi dalam RPJPN 2025-2045, yaitu supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Kedua misi ini kemudian dioperasionalkan dalam RPJMN 2025-2029 melalui Prioritas Nasional (PN) ke-7, yakni memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; serta Program Prioritas (PP) ke-6, yaitu pencegahan dan pemberantasan narkoba. Tantangan strategis yang dihadapi bnn semakin kompleks seiring dengan dinamika peredaran narkoba global. Data World Drug Report 2024 yang dirilis UNODC mencatat bahwa pada tahun 2022 sekitar 292 juta orang, atau 5,6 persen populasi dunia usia 15-64

tahun, menggunakan narkoba setidaknya sekali dalam setahun terakhir. Angka ini meningkat 20 persen dibandingkan satu dekade sebelumnya, sebagian besar akibat pertumbuhan populasi global. Fakta bahwa satu dari 18 orang di dunia dalam usia produktif pernah menggunakan narkoba menegaskan bahwa penyalahgunaan narkoba bukan sekadar persoalan kesehatan, tetapi merupakan tantangan global lintas sektor yang membutuhkan respons komprehensif dari berbagai negara, termasuk Indonesia.

Data dan fakta

Gambaran permasalahan narkotika yang penting untuk disampaikan bahwa berdasarkan survei yang dilakukan oleh BNN, BRIN dan BPS pada tahun 2023, diketahui angka prevalensi penyalahgunaan narkotika di Indonesia mencapai 1,73 persen, atau setara dengan 3,3 juta pengguna aktif.

Dari segmentasi usia, pengguna yang berusia 15-24 tahun mencapai 28,2 persen (atau setara 930.600 orang). Penyalahgunaan narkotika pada usia pelajar dan mahasiswa ini meningkat dua kali lipat dibanding tahun 2021. Kemudian data BNN pada 2024 menunjukkan lebih dari 50 persen kasus tindak pidana narkotika melibatkan remaja dan dewasa muda (17-35 tahun). Dari data dan fakta di atas menunjukkan, penyalahgunaan narkoba telah menyentuh berbagai lapisan masyarakat, tanpa memandang usia, profesi, atau status sosial. Oleh karena itu, upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN) harus dilakukan secara komprehensif, holistik, integratif, dan berkelanjutan. Kenyataan tersebut semakin menguatkan bahwa badan narkotika nasional (BNN) memiliki peran strategis sebagai institusi yang memiliki



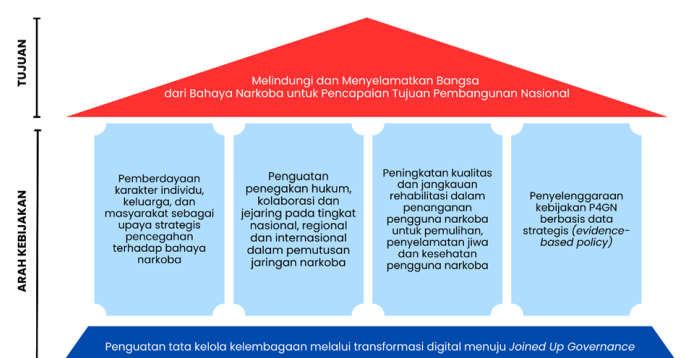


kewenangan atas berbagai kebijakan yang dirancang untuk menghentikan dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Kehadiran BNN merupakan manifestasi nyata komitmen negara melindungi warga dari ancaman narkoba. Pada tahun 2024, BNN berhasil menyita barang bukti dalam jumlah besar yang setara dengan penyelamatan lebih dari empat juta jiwa dari potensi penyalahgunaan. Fakta ini menunjukkan urgensi langkah pemberantasan narkoba untuk mencegah fenomena *Lost Generation*, yaitu hilangnya produktivitas generasi muda akibat rusaknya kualitas sumber daya manusia oleh narkoba. Selain aspek penegakan hukum, BNN juga mencatat peningkatan signifikan dalam kinerja pelayanan publik. Nilai Indeks Pelayanan Publik meningkat dari 3,21 pada 2023 menjadi 4,51 pada 2024. Peningkatan ini mencerminkan komitmen BNN menghadirkan layanan yang lebih responsif, transparan, dan akuntabel. Digitalisasi layanan, penyederhanaan prosedur, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi langkah nyata yang mendorong kenaikan kepuasan publik, sekaligus memperkokoh kepercayaan masyarakat terhadap peran BNN dalam menjaga bangsa dari ancaman narkoba.

Integrasi serta koordinasi lintas sektor (*colaborative governance*)

BNN tidak dapat berjalan sendiri. Kita membutuhkan dukungan dan partisipasi aktif seluruh elemen bangsa. Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam memastikan program P4GN terintegrasi dalam setiap kebijakan. Dunia pendidikan seperti Lemhannas, memiliki tanggung jawab

moral untuk membuat kebijakan (*Policy*) yang berorientasi dan berfokus membentengi generasi muda dengan pendidikan karakter dan nilai kebangsaan. Media memiliki kekuatan besar untuk membangun opini publik yang positif terhadap gerakan anti narkoba. Dan warga masyarakat memiliki tanggung jawab kolektif untuk menjaga diri, keluarga dan lingkungannya dari ancaman narkoba. BNN berperan sebagai komponen utama terkait aspek keamanan narkoba, menyediakan data, analisis risiko, serta rekomendasi kebijakan teknis. Lemhannas RI akan memasukkan isu narkoba ke dalam program edukasi, latihan, dan simulasi untuk meningkatkan kesiapsiagaan nasional sebagaimana semangat empat Konsensus Dasar Bangsa, Pancasila, UUD NRI 45, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika dalam menjaga keutuhan bangsa dengan menjaga generasi penerus bangsa untuk tidak menjadi rusak karena narkoba. Mekanisme koordinasi sering melibatkan forum lintas sektor, perumusan kebijakan bersama, dan evaluasi berkala atas dampak program terhadap stabilitas nasional dengan menyediakan kerangka kebijakan nasional yang menggabungkan narkoba ke dalam dimensi ketahanan nasional, memastikan sinkronisasi lintas sektor, dan alokasi sumber daya yang tepat untuk respons terpadu. Dimana sesuai dengan konsep Asta Gatra dalam ketahanan nasional yang terdiri dari Tri Gatra (tiga



aspek alamiah) dan Panca Gatra (lima aspek sosial). Konsep ini digunakan untuk menjaga stabilitas dan kesejahteraan bangsa dengan cara pandang yang terpadu terhadap seluruh aspek kehidupan nasional.

Arah kebijakan BNN, 5 (lima) Fokus Kebijakan

Mendasarkan diri kepada rencana strategis Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) tahun 2025-2029, terdapat 5 (lima) fokus kebijakan BNN RI, sebagai berikut:

Pertama, Pencegahan

Perluasan program pencegahan, pencegahan yang masif dan inovatif, edukasi dan sosialisasi harus menjangkau generasi muda hingga lapisan masyarakat yang paling bawah dengan pendekatan kreatif, digital dan berbasis komunitas. Pada bidang edukasi, BNN menggandeng Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam program “Sekolah Bersih Narkoba”, Kemah Bersinar dan “Kampus Bersinar.”

Melalui kolaborasi dengan Kemenpora dan Organisasi Kepemudaan, ribuan duta anti narkoba dibentuk untuk mengedukasi teman sebaya dengan bahasa yang lebih ringan dan kreatif.

Kedua, Pemberantasan

Pemberantasan yang tegas namun terukur, penegakan hukum harus dilaksanakan secara profesional, transparan dan berkeadilan, kita tidak boleh kalah dengan jaringan narkoba yang semakin canggih. Pada tahun 2024, BNN melaporkan 618 kasus kejahatan narkoba dan 2 kasus laboratorium narkoba di Clandestine Laboratory Narkotika, diantaranya BNN berhasil mengungkap 27 jaringan narkoba, sebanyak 974 tersangka kasus narkoba dan 11 tersangka kasus laboratorium di seluruh Indonesia telah ditangkap. BNN menemukan barang bukti narkoba berupa 710.980,59 gram sabu, 2.178.034,61 gram ganja, 1.077,69 gram ganja sintetis, 290.737,23 gram heroin, dan 138.404,29 gram ekstasi, 2.760 gram heroin, 4.335,34 gram kokain, 971.000 gram pcc, dan 1.300 milliliter cairan prekursor narkoba. Sementara itu, terdapat 363 orang dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Badan Narkotika Nasional (BNN) 2024. BNN telah berhasil menangkap 26 orang DPO dalam daftar panjang ini; 337 DPO yang tersisa masih dicari



dan digeledah. Pada Mei 2025 BNN berhasil menyita hingga 2 ton Methamphetamine di Kepulauan Riau.

Ketiga, Rehabilitasi

Rehabilitasi yang humanis dan inklusif, BNN menjadi garda terdepan dalam memberikan layanan rehabilitasi yang mudah diakses, bermutu serta mendorong reintegrasi sosial. Melalui layanan konseling dan asesmen awal online, BNN menyediakan layanan asesmen awal secara online bagi calon peserta rehabilitasi, memudahkan akses tanpa harus datang langsung serta konseling bagi keluarga korban juga dapat dilakukan secara daring. Pada sistem informasi rehabilitasi, BNN mengembangkan sistem informasi terpadu untuk mendata dan memantau perkembangan pasien rehabilitasi, memastikan keberlanjutan program pasca-rehabilitasi.

Berbicara rehabilitasi tentu tidak terlepas dari IPWL atau Institusi Penerima Wajib Laporkan adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah. Bahwa Pemerintah telah menyediakan tempat fasilitas layanan wajib



lapor yang telah ditunjuk sebagai rujukan bagi para pecandu narkoba yang ingin mendapatkan penyembuhan dan pemulihan, fasilitas itu mulai dari puskesmas, rumah sakit, lembaga rehabilitasi mitra BNN dan lembaga rehabilitasi sosial lainnya. BNN secara total memiliki 865 fasilitas rehabilitasi yang berfungsi sebagai Institusi Penerima Wajib Laporkan (IPWL) di seluruh Indonesia. Jumlah ini terdiri dari: 216 fasilitas rehabilitasi yang dikelola langsung oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dan 649 fasilitas rehabilitasi mitra BNN yang telah memenuhi

Standar Nasional Indonesia (SNI).

BNN menggunakan strategi pendekatan multi disiplin ilmu dalam proses rehabilitasi dan pemulihan, strategi ini adalah terobosan yang dilakukan BNN dengan melibatkan kerjasama berbagai profesional yaitu dokter, psikolog, konselor dan pekerja sosial untuk memberikan perawatan yang komprehensif, holistik dan disesuaikan dengan kebutuhan individu. Tujuannya adalah mengatasi ketergantungan dari berbagai aspek fisik (medis), psikologis, sosial, dan spiritual untuk meningkatkan peluang pemulihan jangka panjang dan reintegrasi ke masyarakat. Konsep multi disiplin ilmu merupakan bentuk pendekatan holistik, dengan pendekatan ini menghasilkan output dan outcome pasien yang lebih baik dan menyeluruh, dikarenakan anggota tim terdiri dari profesional yang disesuaikan dengan kebutuhan pasien, sehingga menghasilkan rencana perawatan yang progresif dan terukur.

Keempat, Penguatan Riset dan Teknologi

BNN memperkuat basis data analisis intelijen serta riset yang mendukung kebijakan berbasis bukti atau *Evidence Based Policy*.

Disamping itu, setiap tahun muncul ratusan jenis Narkotika Psikoaktif baru (NPS) yang belum tercantum dalam peraturan perundangan. Para pelaku kejahatan memanfaatkan celah hukum ini untuk memasarkan zat berbahaya dengan nama dan bentuk baru.

Situasi ini menuntut BNN untuk bergerak cepat, memperkuat riset laboratorium, literasi dan memperbarui regulasi agar hukum tidak tertinggal dari jenis baru dan modus operandi baru narkoba yang semakin modern.

Kelima, Sinergi Nasional dan Internasional

Bahwa perang terhadap narkoba bukan hanya tugas BNN, tapi seluruh elemen bangsa dalam menghadapi ancaman narkoba yang makin rumit, BNN tidak bisa berjalan sendirian. Peredaran gelap narkoba hari ini bukan lagi kejahatan sederhana, ia melibatkan jaringan lintas daerah (contohnya jaringan Pontianak dan jaringan Aceh), bahkan lintas negara (jaringan Timur Tengah dan jaringan Amerika Latin), belum lagi sindikat laboratorium narkoba. Karena itu, kolaborasi antar lembaga menjadi kunci utama. Bayangkan saja, jaringan narkoba internasional bisa mengatur produksi di luar negeri, mengirim melalui

pelabuhan, memasarkan lewat media sosial, mengalirkan uang lewat rekening digital, dan menyalurkannya ke anak muda lewat kurir lokal. Artinya, BNN hanya bisa kuat jika bersinergi dengan seluruh elemen negara.

Penutup

Mengapa kerja sama itu sangat dibutuhkan, pertama, karena ancamannya lintas sektor, narkoba bukan hanya urusan penegakan hukum, tapi juga menyentuh aspek pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, dan bahkan keamanan nasional. Kedua, karena pola kejahatannya terus berubah, modus baru muncul hampir setiap tahun. Narkoba cair dalam liquid vape, peredaran via e-commerce, hingga pengiriman lewat kurir online. Semua itu tak bisa dihadapi oleh satu lembaga saja. Di tingkat global, BNN aktif bekerja sama dengan UNODC, Interpol, dan lembaga anti narkoba negara sahabat (seperti DEA, CNB Singapura, dan NADA Malaysia) untuk berbagi data intelijen. Pada tingkat nasional, BNN bekerja sama dengan Polri, Bea Cukai, dan TNI AL untuk menutup jalur masuk narkoba dari luar negeri, baik lewat laut, darat, maupun udara.

Diharapkan dengan strategi dan kebijakan yang terarah serta komitmen tinggi dari seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, BNN optimistis program P4GN semakin kuat serta mampu mewujudkan Indonesia bersinar melalui pendekatan *War on Drugs for Humanity*, yakni strategi yang tegas dan tanpa kompromi terhadap bandar serta jaringan peredaran narkoba, namun tetap mengedepankan prinsip kemanusiaan melalui upaya rehabilitatif bagi penyalahguna dengan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Program ini mengandung makna mendalam, bahwa perjuangan kita tidak hanya berfokus pada pemberantasan peredaran narkoba, tetapi juga menyentuh sisi kemanusiaan melalui program rehabilitasi, pemulihan, serta pemberdayaan bagi para penyalahguna narkoba. Kita ingin menegaskan bahwa setiap jiwa yang bisa kita selamatkan adalah aset bangsa yang sangat berharga.

“Genderang perang melawan narkoba bukan hanya tugas BNN, namun merupakan gerakan nasional yang harus kita emban bersama. Kejahatan narkoba adalah *Extra Ordinary Crime* yang mengancam kedaulatan negara, menggerus moral generasi muda, dan menghancurkan potensi sumber daya manusia Indonesia. Kita harus memandang penanganan narkoba sebagai bagian dari strategi *National Resilience* — suatu ketahanan nasional yang bersumber dari kekuatan bangsa sendiri, melalui sinergi, kepemimpinan, dan keteladanan. Dengan semangat kebersamaan, membangun ketahanan masyarakat melalui edukasi, pencegahan, dan pemberdayaan, serta menegakkan hukum dengan tegas namun tetap mengedepankan kemanusiaan untuk para korban.

Semoga dengan sinergi, dedikasi, dan komitmen kita semua, Indonesia dapat benar-benar menjadi *Nation Free from Drugs* — Indonesia Bersinar: Bersih Narkoba.”

War on Drugs for Humanity.

Laksamana Pertama TNI

Gunawan Tri Atmojo

S.T., M.A.P., M.Tr.Opsla., CRMP.

"...kalau kerja kita jalankan dengan niat ibadah, hasilnya pasti berkah..."

Saya ini hanya anak seorang guru SD, tidak punya cantolan apa pun selain Gusti Allah." Kalimat sederhana itu keluar dari mulut Laksamana Pertama TNI Gunawan Tri Atmojo, S.T., M.A.P., M.Tr.Opsla., CRMP. dengan nada tenang, namun mengandung kekuatan besar di baliknya. Kalimat yang merangkum seluruh perjalanan hidup seorang anak pesisir Tuban yang kini dipercaya menjadi Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Utama Lemhannas RI.

Lahir di Tuban, 17 September 1970, Gunawan tumbuh dalam keluarga sederhana namun sarat nilai pendidikan. Ayahnya, Djoemali, adalah seorang guru sekolah dasar, sementara ibunya, Sukimi adalah sosok yang dikenal religius dan penuh kasih. “Kami sekeluarga berlima, dan saya anak ketiga,” ujarnya sambil tersenyum mengenang kisah klasik masa lalu.

Gunawan kecil bukan anak yang manja. Sejak SMP hingga SMA, ia sudah membantu perekonomian keluarga dengan menjadi loper majalah. “Kalau orang dulu bilang loper koran, saya beda — yang saya edarkan majalah, seperti Bobo, Gadis, dan Hai,” kenangnya. Menariknya, sebelum majalah itu dijual, ia selalu membacanya terlebih dahulu. Dari situlah ia belajar banyak hal tentang dunia luar, wawasan, dan mimpi.

Lulus dari SMA Negeri 1 Tuban tahun 1989, Gunawan sempat berada di persimpangan jalan antara melanjutkan kuliah atau langsung bekerja. Ia tahu, kemampuan ekonomi keluarga terbatas. Suatu sore selepas salat Magrib, ia berkata kepada sang ayah, “Pak, saya ingin melanjutkan sekolah yang tidak perlu Bapak biayai.” Seketika, sang ayah meneteskan air mata dan berucap pelan, “Terakbul itu, Le.”

Doa sederhana itu menjadi kenyataan. Tak lama kemudian, Gunawan diajak temannya mengikuti seleksi Taruna Akademi Angkatan Laut (AAL). “Jujur saja, saya tidak tahu apa-apa tentang taruna waktu itu. Teman saya cuma bilang, ‘Ayo Wan, ikut aku tes!’ Saya ikut saja. Ternyata, dari semua teman yang ikut, cuma saya yang diterima.”

Ia juga sempat diterima di Teknik Lingkungan ITS melalui UMPTN tahun 1989, namun akhirnya memilih jalur pengabdian di militer. “Saya ingin sekolah tanpa membebani orang tua. Itu saja niat awalnya. Tapi begitu masuk AAL, saya sadar bahwa ini jalan pengabdian kepada negara.”

Masuk pendidikan AAL angkatan ke-38, Gunawan muda mulai memahami kerasnya dunia militer. Tiga bulan pertama menjadi masa penyesuaian paling berat. Namun di situlah ia menemukan makna disiplin, loyalitas, dan kebersamaan. Ia masih ingat sosok senior yang menjadi inspirasinya, seorang Komandan Korp

Taruna (Dankortar) yang kini menjabat Wakil Gubernur Lemhannas RI, Laksamana Madya TNI Edwin, S.H., M.Han., M.H. “Beliau keras tapi penuh tanggung jawab. Kalau ada masalah di antara taruna, beliau selalu turun tangan sendiri. Dari situ saya belajar bahwa tegas tidak berarti kejam, tapi bentuk kasih sayang dalam dunia militer.”

Disiplin dan pola pikir yang ditempa di AAL membentuknya menjadi pribadi yang adaptif dan pekerja keras. Ia belajar bahwa kepatuhan bukan sekadar tunduk pada perintah, tapi wujud tanggung jawab terhadap negara. “Menjadi taruna berarti memilih jalan pengabdian. Hidup bukan lagi tentang diri sendiri, tapi tentang bangsa.”

Setelah lulus AAL pada tahun 1992, Gunawan ditempatkan di Armada Timur (Koarmada II) sebagai Asisten Perwira Divisi Elektronika (Aspadiklek) di kapal perang KRI Yos Sudarso (353). Dunia laut menjadi rumah keduanya. Ia belajar memahami sistem elektronika kapal, radar, komunikasi, hingga persenjataan. “Semua perangkat yang berhubungan dengan sistem elektronika menjadi tanggung jawab saya. Jadi harus belajar cepat dan tangguh di lapangan.”

Tak lama berselang, saat berpangkat Letnan Satu, ia dipercaya kembali ke dunia pendidikan menjadi Komandan Peleton (Danton) Taruna di Magelang. “Lucu juga waktu itu. Badan saya masih kecil dan kurus. Tapi saya harus mendidik taruna yang badannya lebih besar dari saya,” ujarnya sambil tertawa.

Ia dikenal tegas tapi hangat, bahkan sering menggunakan pendekatan unik dalam mendidik. “Kalau ada yang salah, bukan hanya yang bersalah yang saya hukumi. Saya libatkan semuanya, supaya mereka belajar tanggung jawab dan solidaritas.”

Bagi Gunawan, pendidikan militer bukan sekadar soal fisik atau kedisiplinan, tetapi pembentukan karakter dan moralitas. Setelah dua periode menjadi Danton Taruna (1995–1996), ia kembali berdinastikan di kapal sebelum melanjutkan studi. Tahun 1996, ia mendapat kesempatan kuliah di Universitas Diponegoro (Undip), mengambil jurusan Teknik Elektro.

“Bayangkan, sudah lama di dunia militer, tiba-tiba harus belajar lagi tentang sistem kontrol dan pemrograman C++. Tapi saya

nikmati proses itu. Dunia akademik sipil membuat saya lebih terbuka dan sabar.”

Selama kuliah di Semarang, ia bukan hanya mengejar gelar, tetapi juga menemukan cinta. Dalam kegiatan Latihan Integrasi Taruna Wreda (Latsitarda) Nusantara, ia bertemu dengan Diliya Andriyani, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang kelak menjadi istrinya.

Setelah menyelesaikan kuliah di Universitas Diponegoro pada tahun 1999, Gunawan kembali berdinastikan aktif di lingkungan TNI Angkatan Laut. Dunia laut kembali memanggilmnya. Tahun 2003, ia terpilih sebagai salah satu perwira yang bergabung dalam misi muhibah KRI Dewa Ruci — kapal legendaris pelatihan Taruna AAL — dalam pelayaran menuju Jerman.

Perjalanan itu bukan sekadar tugas, tapi pengalaman spiritual.

Perjalanan KRI Dewa Ruci ke Jerman saat itu bertepatan dengan perayaan ulang tahun ke-50 kapal tersebut. Kapal yang dibuat di Jerman itu kembali ke tanah kelahirannya untuk menjalani perawatan besar. “Setelah perawatan selesai, kapal dibawa pulang oleh kru, sementara kami terbang ke Indonesia. Itu pengalaman luar biasa, dan saya merasa bangga bisa membawa nama Indonesia di laut dunia,” tuturnya.

Setahun berselang, tahun 2004, datang kesempatan lain yang jauh lebih menantang — misi perdamaian PBB atau Mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo (MONUC). Sebagai military observer, ia bekerja bersama perwira dari berbagai negara — Uruguay, Paraguay, Maroko, Malaysia, Tunisia, dan Rusia. “Saya menyebut penugasan itu sebagai pengalaman paling nikmat dan paling berharga sekaligus penuh ujian karena medan tugasnya berbahaya,” kenangnya. Ia bercerita tentang Pasukan Maimai, kelompok pemberontak yang sebagian besar anggotanya masih anak-anak. “Ada anak-anak usia 13 tahun sudah pegang senjata. Mereka tidak paham aturan perang, tapi sudah jadi komandan. Diperintah membunuh, mereka lakukan, karena dianggap jalan untuk hidup.”

Kisah itu membuatnya semakin menyadari makna perdamaian dan pentingnya pendidikan. “Saya lihat sendiri bagaimana



dunia tanpa hukum, tanpa kasih sayang. Itu membuat saya makin bersyukur jadi tentara Indonesia. Kita berperang hanya kalau negara butuh, bukan karena ingin,” ujarnya tegas.

Ketika masa tugasnya selesai dan ia kembali ke Tanah Air, Gunawan merasa menjadi orang yang berbeda. Dunia luar memberinya perspektif baru tentang makna pengabdian. “Saya semakin yakin, kerja adalah ibadah. Kalau niatnya lurus, Allah akan cukupkan semua,” tuturnya.

Di balik kesibukan dan panggilan tugas negara, Gunawan memiliki rumah yang menjadi sumber kekuatannya: keluarga kecil yang sederhana namun penuh makna. Ia menikah dengan Diliya Andriyani pada 23 Januari 2000, perempuan cerdas yang ia kenal semasa kuliah di Semarang. Diliya adalah putri seorang marinir, yang sejak kecil sudah memahami kerasnya kehidupan militer.

Kini mereka dikaruniai dua putra: Hafid Waskito Atmojo dan Muhammad Farhan Yudho Atmojo. Hafid baru saja lulus S1 Teknik Lingkungan ITS dan bekerja di Sucofindo, sedangkan Farhan tengah menempuh pendidikan di Universitas Ciputra jurusan Bisnis Internasional. Gunawan tidak pernah memaksakan anak-anaknya untuk mengikuti jejak militer.

Baginya, pendidikan adalah kunci. Ia selalu menanamkan nilai belajar seumur hidup. “Saya sering bilang ke anak-anak: tidak ada yang namanya membuang waktu atau uang untuk belajar. Sekalipun cuma setahun kuliah, pasti ada ilmu yang kamu dapat,” ucapnya penuh keyakinan.

Sebagai ayah dan suami, Gunawan tidak pernah merasa hebat. Ia justru belajar banyak dari keluarganya. “Istri saya sering

bilang, ‘Papa itu imam di rumah, tapi tanggung jawabnya sendiri di hadapan Tuhan.’ Kalimat itu selalu saya ingat, kadang sambil tertawa juga kalau lupa diingatkan,” ujarnya sambil tersenyum. “Saya selalu menanamkan dalam diri: kerja itu ibadah. Kalau kita jalankan dengan niat ibadah, hasilnya pasti berkah.”

Prinsip itu tidak hanya dijalankan di rumah, tapi juga di tempat kerja. Ia menolak mengambil keuntungan dari hak orang lain. Saat bertugas di Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut (Kodiklat), ia sering melihat prajurit muda dengan latar belakang sederhana. Itu mengingatkannya pada masa lalu. “Sebagian anak didik saya itu anak tukang becak, pedagang pasar, petani. Sama seperti saya dulu. Maka saya berjanji, tidak satu rupiah pun akan saya ambil dari mereka. Itu hak mereka.”

Bagi Laksamana Pertama TNI Gunawan Tri Atmojo, kepemimpinan bukan soal kuasa atau jabatan, tetapi tentang memberi kemudahan bagi orang lain untuk bekerja. “Saya selalu menanamkan dalam diri, jangan jadi pemimpin yang mempersulit. Kalau bisa dipermudah, kenapa harus dibuat susah?” ujarnya dengan nada tegas namun bersahabat.

Ketika dipercaya menjabat Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Utama Lemhannas RI, prinsip itu benar-benar ia terapkan. Ia menyebut dirinya bukan sebagai pejabat, melainkan jembatan antara kebijakan pimpinan dan pelaksana di lapangan. “Saya ini hanya perantara. Tugas saya menerjemahkan perintah pimpinan agar staf bisa melaksanakan dengan ringan dan jelas.”

Di Biro Perencanaan, ia menghadapi tantangan klasik dunia birokrasi: efisiensi

anggaran, restrukturisasi program, dan modernisasi tata kelola. Namun, alih-alih menjadikan itu beban, ia memaknainya sebagai peluang untuk menanamkan budaya kerja baru — disiplin, efisien, dan berintegritas.

“Kadang orang salah paham. Efisiensi bukan berarti pemotongan total. Itu soal menertibkan pengeluaran supaya anggaran tepat sasaran. Kalau dulu beli kertas berlebih, sekarang disesuaikan. Kalau perjalanan dinas bisa digabung, kenapa harus dua kali?” katanya.

Gunawan memiliki satu cita-cita besar: menjadikan Lemhannas RI sebagai lembaga yang modern, terbuka, dan berdaya saing global, tanpa kehilangan jati diri kebangsaan. “Lemhannas ini lembaga strategis. Tapi jangan sampai hanya jadi tempat untuk calon pejabat. Ia harus terbuka bagi masyarakat luas — mahasiswa, ASN, bahkan siswa SMA — agar nilai-nilai kebangsaan tumbuh sejak dini,” ujarnya penuh keyakinan.

Ia mendukung penuh inisiatif pimpinan Lemhannas yang mengembangkan program Training of Trainers (TOT) dan Goes to Campus. Baginya, ini langkah penting agar nilai-nilai ketahanan nasional tidak hanya berhenti di ruang elite, tapi menjangkau akar masyarakat. “Dulu kita punya penataran P4, sekarang harus ada versi modernnya. Lemhannas bisa mengambil peran itu.”

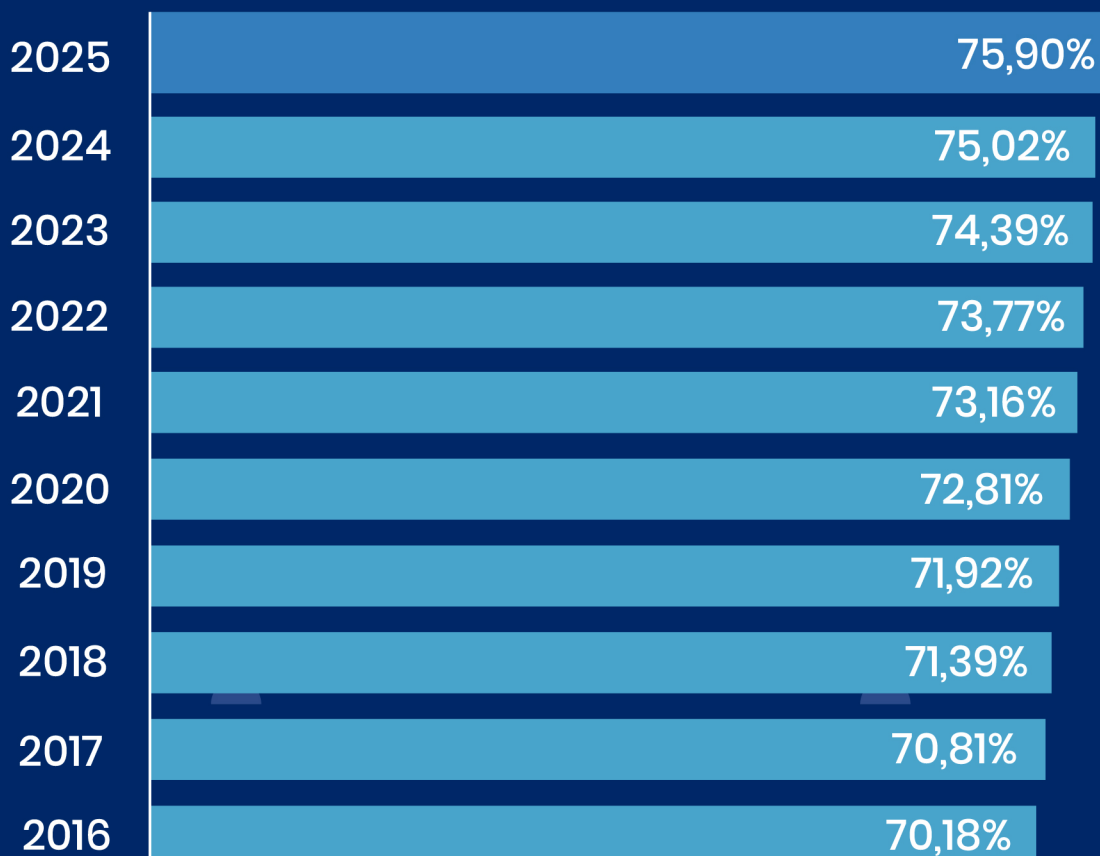
Dalam pandangannya, modernisasi juga harus menyentuh sistem pendidikan dan infrastruktur. Ia pernah mengembangkan konsep “Smart Class”. “Smart Class itu ruang belajar digital, dengan layar utama besar dan koneksi langsung ke laptop setiap peserta. Semua materi terhubung ke server pusat, tapi tetap aman dan tertutup. Efisien dan modern, tapi tetap disiplin.” Ia berharap konsep serupa bisa diterapkan di Lemhannas, agar pembelajaran tentang strategi nasional bisa lebih interaktif, berbasis teknologi, dan berorientasi masa depan. “Kita boleh belajar dari luar negeri, tapi jangan kehilangan jati diri bangsa.”

Bagi Gunawan, modernisasi tanpa karakter hanya akan melahirkan mesin, bukan pemimpin. Karena itu, peningkatan sumber daya manusia menjadi prioritas utama. “Bangunan bisa kita perbaiki, sistem bisa kita ubah, tapi kalau manusianya tidak berkarakter, tidak ada artinya,” pungkasnya.

Kualitas Hidup Orang Indonesia Semakin Baik

Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2025 mengalami peningkatan seperti tahun-tahun sebelumnya. Di tahun ini IPM Indonesia mencapai angka 75,90 yang artinya pembangunan manusia Indonesia masuk kategori tinggi,

Nilai Indeks Pembangunan Manusia 10 Tahun Terakhir



IPM adalah indikator komposit yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan kualitas hidup manusia

Keterangan:

- IPM disusun dari tiga dimensi dasar, yakni umur harapan hidup saat lahir, rata-rata dan harapan lama sekolah, serta pengeluaran riil per kapita per Tahun

Sumber: Indonesiabaik.id

Tri Bintang Dewantoro

“Inovasi untuk Transformasi Digital Lemhannas RI”

Perjalanan hidup selalu penuh dengan tikungan-tikungan kecil yang membentuk diri seseorang. Begitu pula kisah Tri Bintang Dewantoro, atau yang akrab disapa Bintang, seorang ASN Muda yang kini bekerja di Lemhannas RI. Lahir sebagai anak ketiga dari empat bersaudara, ia menghabiskan masa kecil di Kabupaten Ponorogo, sebuah daerah yang dikenal dengan kekayaan budaya Jawa Timur, terutama seni Reog yang begitu melekat dalam identitas warganya. Dari tanah yang sarat tradisi itulah, Bintang memulai langkah yang pelan namun pasti menjadi seorang ASN yang mengabdikan kemampuannya dalam bidang IT di Lemhannas RI.

Masa kecil Bintang tidak diwarnai kemewahan, namun sarat akan pelajaran hidup. Ia menempuh pendidikan awal di SDN 1 Singosaren dan kemudian melanjutkan pendidikan ke SMPN 1 Ponorogo. Disitulah Bintang mulai mengenal dunia olahraga bela diri Taekwondo hingga meraih sabuk biru. Latihan fisik yang menuntut konsistensi dan ketangguhan itu melengkapi pembentukan karakternya. Ia belajar bahwa kedisiplinan bukan sekadar rutinitas, melainkan fondasi yang suatu hari akan menopang perjalanan panjang dalam hidup.

Memasuki masa remaja, Bintang mulai menaruh perhatian besar pada dunia teknologi. Ia melanjutkan pendidikannya di SMKN 1 Jenangan dan memilih jurusan Rekayasa Perangkat Lunak (RPL), sebuah keputusan yang menjadi titik penting dalam hidupnya. Di periode ini ketertarikannya pada teknologi berkembang pesat. Ia juga mulai aktif mengikuti kompetisi-kompetisi akademik, mulai dari Matematika, Fisika, hingga English Competition.

Bagi Bintang, kompetisi bukan hanya soal menang, tetapi wadah untuk melatih kemampuan memecahkan masalah, mengasah mental, dan menguji diri keluar dari zona nyaman. Ia tumbuh menjadi seseorang yang melihat tantangan sebagai peluang belajar.

Segala pengalaman itu menjadi bekal saat ia menempuh pendidikan tinggi. Bintang dinyatakan lolos masuk Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS), sebuah Institusi teknik yang diakui secara nasional, melalui jalur prestasi PMDK-PN. Di kampus ini, Bintang mempelajari Teknik Komputer, melanjutkan jalur yang sudah ia mulai sejak SMK. Namun ia menyadari bahwa untuk bertahan dan berkembang di dunia profesional, kemampuan teknis saja tidak cukup. "Di PENS, saya mendalami Teknik Komputer, yang merupakan kelanjutan langsung dari minat saya di SMK. Menyadari bahwa hard skill teknis harus diimbangi dengan soft skill yang mumpuni, saya membuat keputusan signifikan untuk aktif dalam organisasi," tutur Bintang.

Dengan kesadaran itu, Bintang membenamkan dirinya dalam pengalaman organisasi. Ia terlibat dalam berbagai kepanitiaan, menjadi bagian dari tim jurnalis himpunan, dan kemudian dipercaya menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika dalam struktur Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM PENS). Aktivitas organisasi tersebut, jelas Bintang, mengasah kemampuan komunikasi, kepemimpinan, manajemen waktu, serta memperluas jejaring sosial yang sangat berharga dalam perjalanan karirnya kelak.

Dari sekian banyak pengalaman di PENS, salah satu yang paling membanggakan adalah ketika ia dan timnya terpilih mewakili kampus dalam Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) ke-31 di Universitas Negeri Yogyakarta. Mereka membawa karya Tugas Akhir berupa aplikasi bernama My Traps (Myo Terapi Stroke) yang terhubung dengan Myo Armband (alat yang diletakkan di tangan pasien). Perangkat ini bermanfaat sebagai sensor untuk membaca gerakan tangan bagi penderita stroke yang sedang dalam masa penyembuhan. Bagi Bintang, tampil di PIMNAS adalah pembuktian bahwa kombinasi antara fokus akademik dan aktivitas organisasi dapat menghasilkan karya nyata yang bermanfaat.

Setelah lulus dari PENS pada tahun 2018, Bintang memutuskan mengikuti saran ayahnya untuk mencari pengalaman di sektor swasta. Walaupun ia berasal dari keluarga besar PNS dari kakek, paman, saudara, hingga ayahnya sendiri, justru sang ayah mendorongnya masuk ke perusahaan multinasional agar Bintang mendapat pengalaman dan tantangan kerja yang lebih dinamis. Bintang pun akhirnya diterima bekerja di perusahaan properti multinasional

Propnex dan menjabat di divisi IT selama dua tahun. Bagi Bintang, Pengalaman kerja tersebut membentuk sense of professionalism, etos kerja yang tinggi, serta kemampuan adaptasi di lingkungan kerja yang ritmenya cepat dengan orientasi hasil sangat kuat.

Titik balik besar terjadi pada tahun 2019. Saat menghadiri reuni angkatan, beberapa rekannya yang lolos CPNS 2018 justru mendorongnya untuk mengikuti seleksi CPNS 2019. Lucunya, Mereka bahkan langsung merekomendasikan Lemhannas RI sebagai instansi pilihan. Tanpa ekspektasi besar, Bintang mengikuti seleksi CPNS tersebut. Hasilnya mengejutkan. Ia meraih peringkat pertama pada Seleksi Kompetensi Dasar (SKD). Namun pandemi COVID-19 yang merebak pada awal 2020 membuat proses seleksi tertunda lama. Dalam ketidakpastian tersebut, Bintang mengungkapkan bahwa dirinya sempat ragu untuk terus melanjutkan proses seleksi CPNS.

Namun, kondisi ekonomi global yang terdampak pandemi mengubah perspektif Bintang. Di sektor swasta, perusahaan tempatnya bekerja terkena pemotongan gaji hingga 50%. Kondisi itu membuatnya mempertimbangkan untuk terus melanjutkan proses seleksi CPNS.

Bintang kemudian meminta restu ayahnya, menjelaskan kondisi dan pertimbangannya. Ayahnya merespons dengan kalimat yang sangat membekas: "Le, kalau itu sudah menjadi rezekimu, jalani saja, Nak." Restu tersebut menjadi kekuatan untuk melanjutkan ke Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Melalui proses ketat, Bintang akhirnya resmi bergabung dengan Lemhannas RI pada tahun 2021.

Transisi dari sektor swasta ke birokrasi menjadi pengalaman yang membuka babak baru dalam hidupnya. Kultur kerja di sektor publik dan swasta sangat berbeda. Swasta mengajarkannya profesionalisme, orientasi hasil, dan kecepatan. Selain itu Bintang selalu memegang sebuah prinsip hidup yang ia peroleh dari seorang dosen di PENS di masa perkuliahan SI-nya, "Walaupun kamu merasa tersesat, yakinkanlah bahwa kamu tersesat di jalan yang benar". Prinsip tersebut mengajarkan Bintang bahwa langkah yang ia ambil di setiap langkah akan membawa ke arah yang lebih baik.

"Saya harus yakin bahwa setiap langkah yang diambil adalah bagian dari proses pertumbuhan yang akan membawa saya ke tujuan yang lebih baik," jelasnya.

Bintang juga selalu berpegang pada kalimat "Because easy doesn't change you" yang dulu disampaikan oleh satlab satu atasannya saat ia bekerja di Propnex. Baginya, kalimat ini adalah pengingat bahwa perubahan sejati hanya muncul dari kesulitan.

Kini, di Lemhannas, ia membawa nilai-nilai itu sebagai bagian dari identitas kerjanya. Ia bertekad menjadi ASN yang tidak hanya melayani, tetapi juga profesional dan berorientasi pada inovasi. "Saya berkomitmen untuk mengintegrasikan etos kerja tersebut ke dalam lingkungan birokrasi, menjadikan saya seorang ASN yang tidak hanya melayani, tetapi juga profesional dan berorientasi pada inovasi di bidang tugas saya, demi memberikan kontribusi terbaik bagi lembaga dan negara." tutur ASN yang baru saja menyelesaikan studi S2-nya di Program Studi Magister Teknologi Informasi, Universitas Gadjah Mada melalui beasiswa Kominfo (Komdigi) ini.

Ketika ditanya bagaimana ia memaknai pekerjaan sebagai abdi negara, Bintang merujuk pada pesan mendalam dari ayahnya, "Le, dadi PNS iku gak ono seng bakal sugih. Kecuali awakmu neko-neko. Lek emang awakmu pengen dadi PNS, dadi PNS seng jujur. Soal rezeki golek seng halal liyane (Nak, jadi ASN itu tidak akan membuatmu kaya kecuali kamu aneh-aneh, kalau mau jadi PNS, jadi PNS yang jujur. Soal rezeki cari rezeki halal yang lain),".

Pesan itu menanamkan nilai integritas yang kuat dalam dirinya. Bagi Bintang, integritas bukan sekadar tidak korupsi, melainkan jujur dalam kinerja, jujur dalam pelayanan, dan menjadikan kejujuran sebagai inti profesionalisme. seorang ASN yang berintegritas, lanjutnya, adalah seseorang yang bekerja sesuai prosedur, menyampaikan data secara akurat, tidak manipulatif, serta memberikan layanan tanpa diskriminasi.

Sebagai bagian dari Lemhannas RI, Bintang memiliki harapan besar terhadap Biro Telematika tempat ia bertugas. Ia berharap Biro telematika dapat memberikan pelayanan yang prima bagi lembaga serta dan meningkatkan keamanan data di Lemhannas RI. Ia ingin memastikan bahwa sistem informasi Lemhannas terus andal, mutakhir, dan memiliki keamanan siber yang kuat. Lebih lanjut Bintang berharap Lemhannas RI dapat semakin proaktif dan responsif melalui digitalisasi layanan internal dan peningkatan akses informasi publik yang akuntabel. Transformasi digital baginya bukan hanya proyek teknologi, tetapi perubahan cara bekerja agar menjadi lebih efisien, inklusif, dan adaptif seperti penggunaan e-kinerja yang ia harapkan dapat segera digunakan di Lemhannas RI.

"Kita harus selalu berusaha memenuhi ekspektasi Lembaga, seperti SPBE yang harus naik setiap tahunnya, indeks-indeks yang ada kita selalu dukung. Mulai dari indeks keterbukaan informasi, atau indeks keamanan cyber," pungkasnya.

Langkah Berani Indonesia di COP30: Komitmen, Aksi, dan Diplomasi Iklim Dunia

Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-30 (COP30) di Belém, Brasil, pada 10–21 November 2025 menjadi ajang penting bagi negara-negara untuk mempercepat aksi iklim global. Berlangsung di kawasan Amazon yang menjadi salah satu ekosistem paling vital di dunia, konferensi ini menyoroti perlindungan hutan, pendanaan iklim, dan integritas pasar karbon. Indonesia, sebagai pemilik hutan tropis terbesar ketiga di dunia, tampil menonjol dan memanfaatkan forum ini untuk memperkuat diplomasi iklim serta menegaskan komitmennya terhadap tujuan iklim internasional.

Kehadiran Indonesia ditandai oleh diplomasi tingkat tinggi, negosiasi teknis, dan berbagai kegiatan di Paviliun Indonesia yang menjadi pusat diskusi mengenai pendanaan iklim, solusi berbasis alam, dan tata kelola pasar karbon. Paviliun tersebut mencerminkan ambisi Indonesia untuk berperan dalam pembentukan standar global pembangunan berkelanjutan dan menunjukkan keseriusan negara dalam mendorong transparansi pasar karbon.

Delegasi Indonesia terdiri dari pejabat senior lintas kementerian, termasuk Utusan

Khusus Presiden untuk Perubahan Iklim dan Energi. Kehadiran mereka menegaskan posisi strategis Indonesia dalam tata kelola iklim global. Sebagai negara pengemisi besar sekaligus pemilik ekosistem penyerap karbon yang luas, Indonesia berada pada posisi penting untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan tanggung jawab lingkungan.

Meski menghadapi tantangan koordinasi internal, Indonesia tetap mencatat capaian diplomatik penting, termasuk penguatan kemitraan baru dan keterlibatan aktif dalam diskusi masa depan pasar karbon global. Indonesia juga kembali menegaskan komitmennya untuk mencapai emisi nol bersih pada 2060 atau lebih cepat, didukung kebijakan pengurangan emisi di sektor kehutanan, energi, dan transportasi.

Kontribusi nyata Indonesia terhadap mitigasi perubahan iklim turut menjadi sorotan. Dalam satu dekade terakhir, Indonesia berhasil menekan laju deforestasi, memulihkan lahan gambut, dan memperluas konservasi mangrove. Program restorasi gambut dan pencegahan kebakaran terbukti menurunkan emisi kabut lintas batas. Selain itu, Indonesia menunjukkan kemajuan

dalam pengembangan energi terbarukan seperti tenaga surya dan panas bumi, serta investasi dalam infrastruktur tahan iklim untuk melindungi komunitas rentan.

Pemerintah juga menekankan kebutuhan pendanaan iklim yang sangat besar—lebih dari Rp12.600 triliun hingga 2035—yang menegaskan pentingnya kerja sama internasional. Di luar kebijakan, Indonesia memanfaatkan COP30 untuk memperkuat suara pemuda, masyarakat adat, dan kelompok masyarakat sipil melalui berbagai diskusi di Paviliun Indonesia.

Saat COP30 berakhir, Indonesia membawa pulang komitmen yang diperbarui, hubungan diplomatik yang lebih kuat, dan arah kebijakan yang lebih jelas. Momentum dari Belém menempatkan Indonesia pada posisi lebih berpengaruh menjelang COP31, dengan tantangan utama untuk menerjemahkan komitmen global menjadi aksi nyata di dalam negeri demi kontribusi jangka panjang terhadap upaya dunia melawan perubahan iklim.

Sumber: Berbagai Sumber



Foto: kemenlh.go.id



Foto. NOC Indonesia dan PBSI

Indonesia Bersinar, Runner-Up SEA Games 2025

Indonesia menutup SEA Games 2025 di Thailand dengan pencapaian gemilang, finis sebagai runner-up klasemen akhir dengan raihan 91 emas, 111 perak, dan 131 perunggu, menegaskan dominasinya yang kian kuat di kancah olahraga Asia Tenggara.

Keikutsertaan Indonesia dalam SEA Games 2025 yang berlangsung pada 9–20 Desember di Bangkok dan sejumlah kota lain di Thailand diwarnai oleh deretan kemenangan sekaligus tantangan. Dengan mengirimkan kontingen besar berjumlah 1.021 atlet di berbagai cabang, tim Merah Putih menunjukkan daya juang, bakat, serta kebanggaan nasional sepanjang kompetisi. Hasil akhir menempatkan Indonesia di posisi kedua, di bawah tuan rumah Thailand yang tampil perkasa, sementara Vietnam berada di urutan ketiga. Capaian ini sekaligus mencerminkan konsistensi Indonesia dalam mengukuhkan diri sebagai kekuatan olahraga regional, seiring dengan investasi berkelanjutan pada pembinaan atlet dan pengalaman internasional.

Cabang bulu tangkis kembali menjadi primadona. Final tunggal putra bahkan mempertemukan sesama wakil Indonesia, Alwi Farhan dan Zaki Ubaidillah, dengan Alwi keluar sebagai juara setelah pertarungan sengit tiga gim. Pelukan hangat keduanya usai laga menjadi simbol sportivitas dan semangat kompetitif yang mewarnai perjalanan Indonesia. Pasangan

ganda putra Sabar Karyaman Gutama dan Moh Reza Pahlevi Isfahani menambah emas setelah menundukkan Malaysia, sehingga total tiga emas berhasil dibawa pulang dari cabang ini, melampaui target Kementerian Pemuda dan Olahraga yang hanya dua. Keberhasilan ini kembali menegaskan reputasi Indonesia sebagai kekuatan bulu tangkis dunia sekaligus menampilkan regenerasi atlet yang menjanjikan.

Tak hanya bulu tangkis, cabang modern pentathlon menghadirkan kejutan manis. Dea Salsabila Putri merebut emas di nomor triathlon individu putri dengan catatan waktu 18:01.83, tampil dominan sejak awal hingga akhir. Prestasi Dea dilengkapi oleh perak yang diraih Farras Satrio Aris Sugianto di nomor triathlon putra serta tambahan medali dari nomor laser run, sehingga total satu emas, dua perak, dan satu perunggu berhasil dikoleksi. Keberhasilan di cabang yang relatif baru bagi Indonesia ini menunjukkan kemampuan atlet Tanah Air untuk bersaing di arena yang lebih beragam.

Atletik dan wushu juga menjadi penyumbang besar bagi perolehan medali emas Indonesia, menjaga jarak dengan Thailand di papan klasemen. Namun, cabang kano dan sepeda gunung belum mampu memenuhi target, sehingga Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menegaskan bahwa evaluasi hasil SEA Games akan menjadi dasar penentuan prioritas pendanaan dan program pembinaan ke depan. Pernyataan

tersebut menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan akuntabilitas sekaligus memaksimalkan potensi cabang olahraga yang berpeluang besar mendulang medali.

SEA Games kali ini juga menjadi ajang uji coba bagi ambisi Indonesia di panggung olahraga internasional yang lebih besar, seperti Asian Games dan Olimpiade. Keseimbangan antara cabang unggulan tradisional seperti bulu tangkis dan cabang baru seperti pentathlon serta bersepeda mencerminkan strategi diversifikasi sumber medali. Performa para atlet pun mendapat sambutan hangat dari publik, yang mengikuti jalannya pertandingan dengan antusias dan merayakan setiap kemenangan sebagai simbol kebanggaan bangsa.

Posisi runner-up Indonesia di SEA Games 2025 bukan sekadar angka dalam klasemen, melainkan buah dari persiapan panjang, investasi, dan semangat juang para atlet. Meski Thailand tampil perkasa sebagai tuan rumah, 91 emas yang diraih Indonesia menjadi bukti nyata meningkatnya daya saing olahraga nasional. Pelajaran dari keberhasilan maupun kekurangan akan menjadi bekal berharga untuk masa depan, memastikan bendera Merah Putih terus berkibar di ajang regional maupun global. Para atlet kini kembali ke Tanah Air dengan membawa bukan hanya medali, tetapi juga harapan besar masyarakat untuk melihat kejayaan olahraga Indonesia semakin bersinar di panggung dunia.

Sumber. Berbagai sumber



Foto: BRIN

Rafflesia Hasseltii

Simbol Keunikan dan Kerentanan Alam Indonesia

Rafflesia hasseltii adalah salah satu bunga paling luar biasa di dunia, terkenal karena ukurannya yang sangat besar, penampilan yang mencolok, dan keunikannya yang menakjubkan. Berasal dari hutan hujan Sumatra dan Semenanjung Malaysia, spesies langka ini telah memikat para botanis dan pecinta alam, bukan hanya karena keindahanannya tetapi juga karena biologi yang tidak biasa.

Berbeda dengan kebanyakan tumbuhan, Rafflesia hasseltii tidak memiliki daun, batang, maupun akar. Ia merupakan spesies parasit yang sepenuhnya bergantung pada tanaman inang Tetrastigma untuk memperoleh semua nutrisi. Ketergantungan ini membuatnya sangat spesialis sekaligus rentan, karena tidak dapat hidup tanpa inangnya. Bunganya sendiri spektakuler, sering kali mencapai diameter hingga 70 sentimeter, dengan kelopak tebal berwarna merah tua yang dihiasi titik-titik putih khas. Di antara genus Rafflesia, Rafflesia hasseltii dikenal memiliki variasi bentuk, warna, dan pola paling luas, menjadikan setiap mekarnya sebuah mahakarya alam yang unik.

Siklus hidup tanaman ini sama menariknya dengan kerentanannya. Kuncup membutuhkan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun untuk berkembang, dan ketika akhirnya mekar, keindahan itu hanya bertahan beberapa hari sebelum kelopak layu. Selama masa singkat tersebut, bunga ini mengeluarkan bau menyengat mirip daging membusuk. Aroma ini, meski tidak menyenangkan bagi manusia, memainkan peran ekologis penting dengan menarik lalat bangkai sebagai penyerbuk. Strategi ini menegaskan adaptasi luar biasa tanaman terhadap lingkungannya, memastikan reproduksi dengan cara yang jarang ditemukan pada spesies lain.

Selain spesifikasi biologisnya, Rafflesia hasseltii juga memiliki makna budaya dan ekologis. Bagi banyak komunitas di Sumatra, bunga ini lebih dari sekadar keajaiban botani langka—ia adalah sumber kebanggaan dan identitas. Mekarnya yang singkat telah menjadi simbol keseimbangan rapuh antara manusia dan alam, mengingatkan masyarakat akan pentingnya menjaga hutan. Di Bengkulu dan Sumatra Barat, bunga ini menginspirasi inisiatif ekowisata, di mana pengunjung diajak

menyaksikan mekarnya dengan aturan ketat. Hal ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi warga desa, tetapi juga memperkuat kesadaran akan perlindungan lingkungan. Kehadiran Rafflesia hasseltii di wilayah tersebut menjadikannya ikon budaya, dirayakan dalam festival, seni lokal, bahkan sebagai bagian dari identitas daerah.

Keunikan Rafflesia hasseltii terletak pada kombinasi ukuran raksasa, gaya hidup parasit, dan mekarnya yang singkat. Ia adalah tumbuhan yang menentang definisi konvensional, hadir sebagai keajaiban alam sekaligus simbol kerentanan. Bagi ilmuwan, ia menawarkan wawasan tentang biologi tumbuhan parasit; bagi konservasionis, ia mewakili pentingnya melindungi keanekaragaman hayati; dan bagi masyarakat umum, ia adalah keajaiban hidup yang menimbulkan rasa kagum. Pada intinya, Rafflesia hasseltii lebih dari sekadar bunga—ia adalah lambang langka dari ketahanan dan kerapuhan, pengingat bahwa bahkan spesies paling luar biasa bergantung pada kelangsungan ekosistem tempat mereka hidup.

Sumber: Berbagai Sumber

Danau Towuti

Permata Purba yang Menyimpan Rahasia Iklim Dunia

Berada di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, sekitar 50 kilometer dari Kota Malili, Danau Towuti adalah salah satu permata alam Indonesia yang memikat hati siapa pun yang berkunjung. Danau tektonik ini terletak di ketinggian 293 meter di atas permukaan laut, menghadirkan suasana sejuk dengan air biru jernih yang berpadu indah dengan perbukitan hijau di sekelilingnya.

Danau Towuti bukan sekadar destinasi wisata, melainkan juga saksi sejarah bumi. Terbentuk sejak masa Pliosen, danau purba ini diperkirakan berusia antara 1 hingga 4 juta tahun. Dengan luas mencapai 561,1 kilometer persegi dan kedalaman hingga 203 meter, Towuti tercatat sebagai danau terbesar kedua di Indonesia setelah Danau Toba. Keindahan dan keunikan ekosistemnya membuat kawasan ini ditetapkan sebagai Taman Wisata Alam Danau Towuti.

Di tengah hamparan air yang luas, terdapat tiga pulau eksotis: Pulau Loeha, Pulau Kembar, dan Pulau Bolong. Masing-masing pulau menawarkan

pesona berbeda, mulai dari habitat satwa liar hingga panorama alam yang menawan. Tak hanya itu, danau ini juga menjadi rumah bagi 26 spesies endemik Sulawesi, termasuk ikan opudi yang hanya hidup di Towuti dan sangat diminati hingga ke mancanegara. Selain itu, bunga anggrek epifit langka dan buaya muara turut memperkaya keanekaragaman hayati di kawasan ini.

Keistimewaan Danau Towuti tidak berhenti pada keindahan alamnya. Sedimen di dasar danau menyimpan catatan iklim masa lalu yang sangat berharga bagi penelitian ilmiah. Penelitian menunjukkan bahwa 30 ribu tahun lalu, kawasan sekitar danau pernah kering dan tidak beriklim tropis seperti sekarang. Fakta lain yang menarik, pada kedalaman 135 meter, suhu air justru lebih hangat dibanding permukaan. Hal ini membuat Towuti menjadi laboratorium alam yang penting untuk memahami dinamika iklim tropis. Pada tahun 2007, danau ini bahkan menjadi pusat penelitian internasional melalui Towuti Drilling Project yang melibatkan ilmuwan dari Amerika Serikat, Jerman, dan Kanada.

Bagi wisatawan, Towuti menawarkan pengalaman yang tak terlupakan. Airnya yang jernih seakan menjadi cermin alami, memungkinkan pengunjung melihat dasar danau dari permukaan. Aktivitas seperti berenang, snorkeling, hingga memancing ikan endemik menjadi daya tarik tersendiri. Kawasan sekitar juga menyediakan lokasi berkemah yang nyaman, lengkap dengan panorama matahari terbenam yang memukau. Sore hari, langit berwarna keemasan berpadu dengan luasnya danau menciptakan suasana romantis yang sulit dilupakan. Ditambah lagi, keberadaan air terjun kecil di sekitar danau semakin melengkapi pesona wisata alam ini.

Dengan perpaduan antara keindahan, keunikan ekosistem, dan nilai ilmiah yang tinggi, Danau Towuti bukan hanya destinasi wisata, tetapi juga jendela untuk memahami sejarah bumi dan iklim tropis. Sebuah tempat di mana alam, ilmu pengetahuan, dan petualangan berpadu menjadi satu pengalaman luar biasa.

Sumber: Goodnewsfromindonesia.id

Foto. Penalutim.com

Penerima Penghargaan Akademik Terbaik P3N 26 Lemhannas RI: **Inspektur Jenderal Polisi Dr. Barito Mulyo Ratmono, S.I.K., M.Si.**

Program Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) Angkatan 26 kembali menunjukkan perannya sebagai wahana strategis bagi pembentukan pemimpin nasional lintas sektor. Dari rangkaian pendidikan yang menuntut ketajaman analisis, kedisiplinan akademik, dan kemampuan membaca dinamika kebangsaan secara objektif, Lemhannas RI menetapkan Inspektur Jenderal Polisi Dr. Barito Mulyo Ratmono, Analis Kebijakan Utama Bidang Sespimti Lemdiklat Polri, sebagai penerima penghargaan akademik terbaik.

Beliau memasuki program ini dengan motivasi yang selaras dengan orientasi Lemhannas sebagai sekolah kader pemimpin bangsa. Dalam wawancara, ia menyebut Lemhannas sebagai ruang penting bagi integrasi perspektif lintas kelembagaan. “Lemhannas itu banyak yang berpandangan sebagai sekolah terakhir bagi kita yang di TNI Polri,” ujarnya. Ia memandang P3N sebagai kesempatan untuk memperkuat komunikasi strategis antar unsur bangsa dalam mendukung ketahanan nasional.

Selama mengikuti pendidikan, ia menempatkan interaksi antar peserta sebagai nilai yang menentukan. Keragaman latar belakang peserta—dari kementerian/lembaga, pelaku usaha, hingga partai politik—menjadi ruang pembelajaran yang menantang dan memperkaya. “Pesertanya heterogen... dan diskusinya sangat kaya warna,” ungkapnya. Beragam pengalaman ini memperluas pandangan dan menuntut kemampuan untuk menghubungkan wawasan praktis dengan kerangka teoritis yang diajarkan para tutor.

Sebagai pejabat yang tetap memegang tanggung jawab kedinasan, ia menjaga kualitas akademik melalui perencanaan yang disiplin. Setiap jadwal pendidikan dijadikan acuan untuk menyiapkan materi jauh lebih awal. “Biasanya saya mulai bekerja sejak jadwal dibagikan... meskipun lembar penugasannya belum keluar, kita sudah bisa membaca arah diskusinya,”

jelasnya. Pendekatan ini menghasilkan naskah dan argumentasi yang lebih matang dalam setiap sesi.

Tantangan terbesar baginya bukan pada volume penugasan, tetapi pada proses intelektual untuk mengaitkan pengalaman profesional dengan teori ketahanan nasional. Menghadirkan argumen yang dapat diterima oleh tutor dan peserta lain membutuhkan pembuktian yang kuat dan penggunaan teori yang relevan. Dinamika ini mencerminkan karakter pembelajaran P3N yang menekankan objektivitas, ketelitian, dan dialog kritis.

Penetapan beliau sebagai penerima penghargaan akademik terbaik merupakan keputusan Lemhannas RI berdasarkan konsistensi performa akademik, ketepatan analisis, kontribusi dalam diskusi, dan kemampuan mengintegrasikan perspektif kepolisian dengan isu-isu strategis kebangsaan.

Kepada peserta berikutnya, ia memberikan prinsip-prinsip akademik yang dianggapnya fundamental. Semua tugas, menurutnya, harus “berdasarkan data dan fakta, bukan persepsi”. Ia menilai bahwa analisis perlu ditopang teori yang relevan dengan perkembangan terkini dan solusi yang ditawarkan harus bersifat aplikatif. Ia juga menekankan

pentingnya menjaga etika berargumentasi. “Yang paling penting itu kita tidak menyakiti teman-teman yang berdiskusi,” tuturnya, karena kebenaran hanya dapat diuji melalui dasar teori dan batasan analitis yang jelas.

Penghargaan ini menjadi cerminan standar akademik Lemhannas RI dalam menyiapkan pemimpin nasional yang objektif, adaptif, dan mampu mengintegrasikan perspektif lintas sektor dalam menghadapi kompleksitas tantangan kebangsaan.



Penerima Penghargaan KKP Terbaik P3N 26 Lemhannas RI: **Brigadir Jenderal Polisi Muhammad Firman, S.I.K., M.Si.**

Program Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) Lemhannas RI menempatkan penyusunan Kertas Karya Perseorangan (KKP) sebagai instrumen penting untuk menguji kemampuan peserta dalam membaca persoalan strategis nasional. Pada penyelenggaraan P3N Angkatan 26, Brigjen Pol Muhammad Firman ditetapkan sebagai penerima penghargaan KKP terbaik melalui karya berjudul Penguatan Ekspansi SPPG Polri dalam Penyerapan Produk Lokal Guna Mendukung Ketahanan Pangan dalam Rangka Ketahanan Nasional.

Penyusunan KKP ini berangkat dari pengamatan beliau terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas nasional. Ia menilai bahwa program tersebut tidak cukup hanya dilihat dari aspek pembangunan fasilitas. Dalam wawancara, beliau menegaskan, “Dengan anggaran yang besar, apabila program itu hanya berfokus pada pembangunan SPPG saja, tidak sepadan.” Menurutnya, SPPG Polri harus berfungsi sebagai penggerak ekonomi lokal melalui penyerapan produk setempat sehingga manfaatnya tidak hanya berhenti pada pemenuhan gizi, tetapi juga mendorong ekonomi kerakyatan.

Dalam proses penyusunan KKP, beliau memadukan berbagai pendekatan. Ia menelaah literatur, regulasi, dan laporan operasional SPPG; melakukan komunikasi dengan pihak yang menjalankan SPPG maupun program makan bergizi gratis; dan menelaah permasalahan lapangan seperti isu higienitas, sanitasi, serta kasus keracunan. Pendekatan tersebut memperkuat analisisnya dan memastikan rekomendasi yang disusun berbasis fakta dan praktik nyata. Ia menilai bahwa SPPG

Polri, sebagai salah satu penyelenggara terbesar, memiliki posisi yang dapat memicu perbaikan menyeluruh pada model SPPG lainnya. “SPPG Polri menjadi contoh yang diapresiasi oleh Bapak Presiden terkait jaminan keamanan pangannya,” ujarnya.

Menurut Firman, tantangan utama dalam penyusunan KKP ini terletak pada keterbatasan data. Sebagian SPPG yang dibangun belum beroperasi sehingga tidak semua dapat dijadikan objek kajian. Situasi ini menuntut ketelitian dalam memilih lokasi dan unit operasional yang relevan agar analisis tetap valid. Keterbatasan ini justru memperkuat proses penelitian karena mendorong beliau untuk menyusun argumen yang lebih terukur dan berbasis bukti yang dapat diverifikasi.

Rekomendasi yang ditawarkan dalam KKP ini menunjukkan pemahaman yang komprehensif terhadap fungsi SPPG dalam kerangka ketahanan nasional. Salah satu poin penting adalah perlunya kontrak kerja sama yang jelas antara SPPG Polri dan pemasok produk lokal. Kontrak tersebut harus menjamin standar higienitas, legalitas,

dan keamanan pangan untuk mengurangi risiko operasional dan potensi gugatan. Beliau menegaskan bahwa tugas pokok Polri bukan mengelola dapur, tetapi memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam arti yang lebih luas. Pelayanan tersebut mencakup keamanan pangan, kesejahteraan, dan berjalannya ekonomi lokal, yang pada akhirnya memperkuat ketahanan nasional.





- 1 Kegiatan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Birokrat, Akademisi, Tokoh Masyarakat, Organisasi Profesi, TNI dan Polri angkatan ke-221 resmi ditutup di Secapa TNI AD, Bandung, pada Jumat (3/10).
- 2 Pelaporan Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) 26 Lemhannas RI pada Rabu (01/10).
- 3 Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 Tahun 2025 bertempat di Lapangan Tengah Lemhannas RI pada Selasa (28/10).





- 4 Ceramah Wakil Menteri Dalam Negeri Dr. Bima Arya Sugiarto kepada peserta Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Angkatan II Tahun 2025 di Lemhannas RI pada Rabu, (5/11).



- 5 Seminar Nasional P3N XXVI yang mengangkat tema "Transformasi Sistem Pendidikan Indonesia 2025-2045: Membangun Ekosistem SDM Unggul untuk Memperkuat Ketahanan dan Daya Saing Bangsa" di Ruang Dwi Warna Purna, Lemhannas RI, pada Kamis (27/11).

- 6 Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si. meraih penghargaan tokoh penguat ketahanan dan integritas nasional pada detikcom Awards 2025 pada Rabu (26/11).



7 Round Table Discussion Peningkatan Kompetensi SDM Unggul Melalui Kolaborasi Multipihak di Era Digital pada Kamis (4/12)

8 Gubernur Lemhannas RI Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si. dan Wakil Gubernur Lemhannas RI Laksdya TNI Edwin, S.H., M.Han., M.H. meninjau pelaksanaan tes Potensi Akademik (P4N) Angkatan LXIX pada Rabu (10/12)

9 Lokakarya Penguatan Sistem Budaya Kerja Tenaga Pendukung Pendidikan Dalam Proses Pendidikan Kepemimpinan Tingkat Nasional Lemhannas RI di Auditorium Gajah Mada, pada Senin (8/12).





- LEMHANNAS RI MENGUCAPKAN -

Selamat
Natal
dan Tahun Baru 2026





LEMHANNAS RI
KEMBALI MERAH KUALIFIKASI BADAN PUBLIK

INFORMATIF

ANUGERAH KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2025

